

**KEBIJAKAN SISTEM KAFALA PEMERINTAH QATAR TERHADAP
PEKERJA MIGRAN PIALA DUNIA 2022**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh Derajat
Sarjana S1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Diajukan oleh:

SYAFRAN NAUFAL

17323070

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan
Judul:

**KEBIJAKAN SISTEM KAFALA PEMERINTAH
QATAR TERHADAP PEKERJA MIGRAN PIALA
DUNIA 2022**

Dipertahankan di Depan Penguji Skripsi Prodi
Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu
Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Untuk
Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan
Internasional

Pada tanggal

21 Juni 2021

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi

Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A

Dewan Penguji:

Tanda Tangan

1. Wili Ashadi, S.H.I., M.A.
2. Gustri Eni Putri, S.IP., M.A.
3. Hasbi Aswar, S.IP., M.A.

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Syafran Naufal
No. Mahasiswa : 17323070
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Kebijakan Sistem Kafala Pemerintah Qatar terhadap Pekerja Migran Piala Dunia 2022

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi, saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karena jiplakan atau karya orang lain

Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia

Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 21 Juni 2021



Syafran Naufal

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'amin

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

Ayah dan Mama

Atas segala doa, dukungan, perjuangan, pengorbanan, nasehat dan semangat yang tak terhingga, yang telah diberikan selama ini

Semua Keluarga Besar

Terima Kasih atas doa, nasehat dan bantuan yang telah diberikan selama ini

Rekan-rekan HI UII Angkatan 2017

Terima Kasih atas kebersamaan dan perjuangan bersama selama berkuliah di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah *subhanallahu wa ta'allah* Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Atas segala nikmat, serta rahmat dan karunia yang telah diberikan-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam yang selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarga, sahabat dan para jajaran pengikutnya.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak pihak yang memberikan bimbingan, bantuan, dorongan dan tentunya dukungan sepenuh hati. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan Terima Kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran, kemudahan serta diberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada penulis hingga akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan keterbatasan yang dimiliki penulis sendiri
2. Kedua orang tua yang sangat berperan besar dalam mendoakan dan mendukung saya dalam segala hal. Walaupun, terpisah oleh jarak saya sangat bersyukur bisa diberikan kepercayaan kepada anak nya untuk merantau di kota pelajar khususnya di Universitas Islam Indonesia ini. Semoga anakmu ini bisa membahagiakan kalian.
3. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, ST.,M.Sc.,Ph.D.
4. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Hangga Fathana S.IP., B.Int.St., M.A selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.

6. Bapak Wili Ashadi, S.H.I.,MA. selaku dosen pembimbing saya yang telah dengan sabar dan juga pengertian mendampingi, mengarahkan, membimbing saya selama proses pengerjaan tugas akhir ini. Yang mana banyak sekali ilmu dan pelajaran yang beliau berikan kepada saya juga selaku dosen dan khusus dosen pembimbing tugas akhir. Semoga Bapak selalu mendapatkan lindungan dari Allah SWT.
7. Seluruh dosen Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia atas setiap ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama berproses dalam masa perkuliahan sampai saat ini.
8. Tak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih kepada Mba Mardiatul Khasanah selaku staff jurusan yang sudah sangat membantu seluruh proses administrasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga F1, Awin, Rafi, Ucil dan Roji. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan, khususnya teman kost saya, Awin dan Rafi karena sudah mengajarkan untuk selalu berjuang bersama-sama. Dan untuk Roji dan Ucil karena telah mejadi teman untuk berbagi segala suka dan duka. Semoga dan bisa bertemu kedepannya dan selalu menjalin silaturahmi. *See you on top guys!*
10. Para sahabat di jogja Sonia, Akbar, dan Jihan karena telah selalu setia menemani saya dan selalu mendengar keluh kesah dalam dunia perkuliahan serta selalu ada dalam segala suka dan duka. Semoga kita bertemu lagi dan sukses bersama-sama.

11. Para sahabat di jogja Sonia, Akbar, dan Jihan karena telah selalu setia menemani saya dan selalu mendengar keluh kesah dalam dunia perkuliahan serta selalu ada dalam segala suka dan duka. Semoga kita bertemu lagi dan sukses bersama-sama.
12. Grup “Jomplang” Rio, Sondot, Ziaul, Mumu dan Farhan yang selalu menemani saya selama berada di Medan dan mendengar keluh kesah selama mengerjakan penelitian ini. Semoga kita bisa sukses bersama-sama.
13. Keluarga FOURSTORIE, Rapek dan Poso karena telah memberikan saya pengalaman serta hal-hal baru yang tidak pernah saya dapatkan sebelumnya. Semoga kita selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya.
14. Keluarga besar SERUMPUN 2019 karena telah memberikan saya pelajaran yang sangat berharga untuk kemudian berguna bagi masa depan. Semoga kita selalu diberi kemudahan dan kesuksesan.
15. Semua pihak yang terlibat dan tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Dari hati saya yang paling dalam, Terima kasih banyak.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

ii

HALAMAN PERNYATAAN

iii

HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Signifikansi	6
1.5 Cakupan Penelitian	6
1.6 Tinjauan Pustaka	7
1.7 Landasan Teori/Konsep/Model	10
1.8 Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Subjek dan Objek Penelitian	15
3. Metode Pengumpulan Data	15
4. Proses Penelitian	15
BAB II PEKERJA MIGRAN DAN DINAMIKA QATAR SEBAGAI PENYELENGGARA PIALA DUNIA 2022	17

2.1	Terpilih nya Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022	17
2.2	Kondisi pekerja Migran di Qatar	19
2.3	Peran Pemerintah Qatar	25
2.4	Penerapan Sistem Kafala	29
BAB III IMPLEMENTASI HUMAN SECURITY TERHADAP PEKERJA MIGRAN YANG TERDAMPAK DARI SISTEM KAFALA		35
3.1	Penerapan Human Security terhadap pekerja migran di proyek pembangunan Piala Dunia 2022 di Qatar	35
3.2	Analisis Sistem Kafala berdampak terhadap Personal Security pekerja migran Piala Dunia 2022 di Qatar.	37
3.3	Analisis Sistem Kafala berdampak terhadap Economic Security pekerja migran Piala Dunia 2022 di Qatar	41
BAB IV PENUTUP		46
4.1	Kesimpulan	46
4.2	Saran dan Rekomendasi	47
DAFTAR PUSTAKA		49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 9 Desember 2010 FIFA sebagai federasi tertinggi sepak bola resmi mengumumkan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Qatar akan menjadi negara Arab pertama dalam sejarah yang menyelenggarakan Piala Dunia. Piala Dunia ini menjadi momen dalam perkembangan politik serta ekonomi yang akan menempatkan Qatar sebagai aktor geopolitik yang cukup berpengaruh. Qatar terpilih sebagai tuan rumah setelah mengalahkan Australia, Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat yang juga mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Alasan Qatar mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 adalah ingin memperkenalkan budaya Arab serta ingin menghilangkan citra Arab yang selama ini dikenal selalu menjaga jarak dengan Barat. Dalam upaya mempersiapkan Piala Dunia 2022, Qatar akan melakukan pembangunan besar-besaran yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya, mulai dari stadion, pembentukan kamp basis tim sebagai Training center, wsima atlet dimana tempat para atlet menetap selama Piala Dunia serta tempat-tempat wisata yang nantinya akan menjadi penunjang dalam Piala Dunia 2022. Qatar mempersiapkan segala aspek dalam penyelenggaraan Piala Dunia kali ini, termasuk pembangunan infrastruktur penunjang pesta terbesar Sepak bola ini (Ganji, Revealed: Leveraging the World Cup: Mega Sporting Events, Human Rigts Risk, and Worker Welfare Reform in Qatar , 2016). Qatar adalah salah satu negara GCC yang menganut Sistem kafala.

Qatar membangun 9 stadion baru dan 3 stadion yang akan direnovasi. Total 12 stadion yang akan digunakan Qatar selama penyelenggaraan Piala Dunia. Total 7 kota akan menjadi penyelenggara yaitu Doha, Al-Daayen, Al-Khor, Al-Rayyan, Al-Shamal, Al Wakrah, dan Umm Sial. Dalam rangka persiapan menuju penyelenggaraan Piala Dunia 2022, Qatar menggelontorkan setidaknya \$200 miliar dalam proyek real estate dan pengembangan. Qatar memperkerjakan sekitar 500.000 hingga 1,5 juta pekerja asing. Namun upaya Qatar dalam mempersiapkan Piala

Dunia bukan tanpa masalah, antara tahun 2010 dan 2013 lebih dari 1.200 pekerja migran meninggal dunia. Hal ini disebabkan pekerja asing yang tunduk pada kerja paksa dan penumpukan jumlah pekerja dalam satu tempat. Pekerja asing yang berasal dari berbagai negara miskin seperti Nepal, Bangladesh dan India. Isu pekerja migran sudah sejak lama menjadi masalah di Qatar, dari data yang dihimpun Qatar memperkerjakan sekitar 1,7 juta pekerja migran yang mengalami kerja paksa. Melalui data ini banyak aktivis atau bahkan Badan Amnesty International mendesak pemerintah Qatar untuk melakukan klarifikasi terkait adanya dugaan kerja paksa yang dialami oleh pekerja migran tersebut (Amnesty International, 2016)

Sejak tahun 1970-an negara-negara Teluk sangat bergantung kepada tenaga kerja Asing. Tenaga kerja asing ini biasanya diperkerjakan sebagai buruh tambang minyak dan lain-lain (Bel-Air, 2014) .Namun melalui momen terpilih nya Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia ini semakin membuka pintu. bagi tenaga kerja asing untuk masuk ke Qatar. Tenaga kerja Asing yang berasal dari negara-negara Asia seperti India, Nepal dan Bangladesh. Para migran tersebut yang menjadi tenaga kerja asing sering terlibat dalam praktik-praktik perburuhan yang dianggap tidak adil. Alasan ekonomi menjadi faktor utama banyak migran yang mencari pekerjaan di Qatar (Council, 2017) .Banyak dari para migran tersebut sebelumnya adalah pengangguran-pengangguran yang berasal dari negara miskin (Jureidini, 2014) .Untuk mendapatkan pekerjaan mereka para migran tersebut dikenakan biaya yang cukup tinggi. Dari data yang dihimpun Amnesty Internasional yang mewawancarai langsung pekerja migran di Qatar, mereka harus membayar hingga 500 USD sampai 4.300 USD kepada agen perekrutan agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan di Qatar. Akibat biaya perekrutan yang tergolong sangat tinggi ini akhirnya membuat para pekerja tersebut terlilit hutang yang kemudian membuat mereka sulit meninggalkan Qatar (Amnesty International, 2016)

Qatar adalah salah satu negara yang menganut Sistem Kafala. Sistem kafala mengatur hubungan antara majikan dan pekerja migran di banyak negara-negara di Asia Barat. Negara-negara yang menganut sistem kafala adalah negara-negara yang tergabung dalam GCC (Internantional Labour Organization, 2018) . Di bawah

sistem Kafala, status imigrasi para pekerja migran terikat hukum dengan majikan atau sponsor yang disebut Kafeel. Pekerja migran tidak dapat memasuki negara atau mentransfer pekerjaan atau meninggalkan negara dengan alasan apa pun tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Kafeel. Pada praktiknya, sering sekali Kafeel melakukan kontrol yang kemudian merugikan pekerja migran, para Kafeel umumnya menyita paspor dan dokumen perjalanan para pekerja migran meskipun praktik ini tergolong ilegal di beberapa negara tujuan.

Hukum di Qatar mengatur bahwa dalam Standar Kesejahteraan Pekerja memungkinkan maksimal empat tempat tidur per kamar dan melarang berbagi tempat tidur (Ridgwell, 2019). Hal ini tentu sangat berbeda dengan kenyataan yang terjadi di tempat tinggal para pekerja migran di sekitar proyek pembangunan stadion tempat berlangsungnya Piala Dunia tahun 2022 nanti. Tidak hanya itu, gaji juga menjadi masalah atau kendala yang harus dihadapi para pekerja migran di Qatar ini. Agen perekrutan yang mendatangkan mereka ke Qatar sering kali membuat janji palsu tentang gaji yang akan diterima pekerja. Contohnya seperti yang dihimpun Amnesty International ketika sedang mewawancarai pekerja migran tersebut, para manajer mereka memberi gaji tidak sesuai dengan perjanjian dan mengancam bahwa visa mereka akan dibatalkan dan mereka akan dikirim kembali ke negara asal mereka dengan kondisi terlilit utang, hal ini yang membuat para pekerja tidak mau harus tetap menetap di Qatar dan melanjutkan pekerjaan mereka (Patisson, 2013).

Hal ini semakin menjadi perhatian dunia, seberapa layak Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia sering kali dipertanyakan, melihat banyak nya korban jiwa yang berasal dari pekerja migran tersebut. Masalah berikutnya yang dihadapi para pekerja adalah mereka tidak bisa meninggalkan stadion atau kamp tempat tinggal mereka. Hal ini disebabkan karena beberapa pengusaha tidak memperbarui izin tinggal para pekerja, meskipun dalam Hukum yang berlaku di Qatar, mereka harus memperbarui izin tinggal mereka. Para pekerja mendapatkan Kartu ID yang berlaku untuk perizinan tinggal dan bekerja di Qatar, tanpa kartu tersebut para pekerja bisa dipenjara atau didenda, oleh karena itu mereka tidak punya pilihan lain selain tidak keluar dari area kamp tempat mereka menetap yaitu berada di dekat Stadion Khalifa di kota Doha.

Para pekerja migran tersebut juga mendapat perlakuan seperti paspor nya disita oleh majikan mereka. Terlebih jika mereka ingin meninggalkan Qatar mereka harus mendapatkan “izin keluar” yang harus disetujui oleh perusahaan mereka (Amnesty International, 2019). Namun sering kali perusahaan tersebut mengabaikan permintaan ini atau mengancam pekerja dengan mengatakan bahwa mereka tidak bisa pergi sampai kontrak mereka habis. Ditambah lagi jika para pekerja mengeluh tentang kondisi mereka atau ingin mencari bantuan, mereka sering diintimidasi oleh majikan mereka. Banyak NGO bahkan PBB sudah mendesak pemerintah Qatar untuk angkat bicara terhadap kasus ini, tidak hanya pemerintah Qatar yang dinilai bertanggung jawab, namun FIFA sebagai badan tertinggi sepak bola sekaligus yang menunjuk Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 juga dinilai mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap permasalahan ini (BBC, 2016).

Sistem Kafala adalah sebuah hukum yang berlaku di negara-negara teluk yang tergabung dalam *Gulf Cooperation Council* (GCC). Sistem Kafala sendiri dibuat untuk mengatur bagaimana pekerja migran tersebut diatur bagaimana cara kerja mereka selama dipekerjakan selama berada dalam kontrak tersebut.

Join unions	Change job or quit without permission	Leave country without permission	Minimum wage
Bahrain	Yes	After 1 year	Yes
Jordan	Yes	After 1 year	Yes
Kuwait	Yes	After 1 year	Yes
Lebanon	Yes	No	Yes
Oman	Yes	No	Yes
Qatar	In some cases	Yes	In most cases
Saudi Arabia	No	In some cases	No
UAE	No	No	Yes

Sources: International Labor Organization; Saudi Ministry of Human Resources and Social Development.

Sistem Kafala di Qatar sendiri berada di bawah yurisdiksi kementerian dalam negeri, bukan kementerian tenaga kerja, oleh karena itu pekerja tidak memiliki perlindungan di bawah undang-undang perburuhan negara tuan rumah. Hal ini yang kemudian membuat rentan nya terjadi eksploitasi dan perampasan hak-hak dari para tenaga kerja khususnya para pekerja migran tersebut. Selain hal tersebut, dalam aturannya Sistem Kafala mengatur bahwa hanya sponsor atau orang yang mempekerjakan para pekerja migran yang dapat memperbarui atau memperpanjang visa para pekerja migran tersebut. Dalam hal ini para pekerja migran termasuk golongan warga negara yang bukan merupakan warga negara asli, oleh karena itu status hukum kerja mereka berbeda dengan warga negara asal Qatar, hal ini yang membuat terciptakan ketidakseimbangan kekuatan yang dapat dieksploitasi oleh sponsor atau orang yang mempekerjakan para pekerja migran tersebut.

Riset ini akan membahas tentang Dampak dari Sistem Kafala terhadap kasus pekerja migran yang terjadi dalam proyek pembangunan Piala Dunia 2022. Bagaimana sistem Kafala dimanfaatkan oleh pemerintah Qatar dalam mencapai kepentingannya terhadap kasus pekerja migran ini. Sampai saat ini pekerja yang meninggal dunia sudah mencapai 4 ribu orang. Para pekerja migran sudah melakukan demonstrasi untuk mendesak pemerintah Qatar agar bertindak serius terhadap peristiwa yang mereka alami. Riset ini akan melengkapi riset sebelumnya yang membahas masalah pekerja migran Piala Dunia Qatar tahun 2022

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Kebijakan Sistem Kafala terhadap kasus pekerja migran pada persiapan Piala Dunia 2022 di Qatar?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan Informasi kepada pembaca mengenai masalah pekerja migran yang terjadi dalam persiapan Piala Dunia 2022 di Qatar.

2. Menjelaskan kepada pembaca bagaimana dampak Sistem Kafala terhadap kasus pekerja migran pada persiapan Piala Dunia 2022 di Qatar
3. Mengidentifikasi Sistem Kafala yang dianut oleh Pemerintah Qatar dalam kasus pekerja migran Piala Dunia 2022 di Qatar.

1.4 Signifikansi

Penelitian ini akan membahas tentang Dampak sistem Kafala terhadap kasus kerja paksa pekerja migran pada persiapan Piala Dunia 2022 di Qatar yang mana masalah dalam penelitian ini relevan dengan fenomena-fenomena yang ada di Hubungan Internasional. Dalam masalah ini mencakup fenomena seperti isu kemanusiaan, national interest dan eksploitasi tenaga kerja serta masalah migrasi yang mana fenomena tersebut mencakup isu-isu yang dibahas dalam Hubungan Internasional. Penelitian ini sangat layak diteliti karena masalah ini merupakan salah satu masalah yang paling sering dibahas dalam dunia internasional dan masalah ini masih berjalan dan berkembang hingga sekarang, sehingga masalah pekerja migran Piala Dunia tahun 2022 di Qatar ini sangat layak untuk diteliti. Penelitian ini juga mencoba untuk melengkapi penelitian-penelitian yang bertemakan serupa yaitu tentang pekerja migran dalam Piala Dunia 2022 di Qatar yang mana perbedaan penelitian ini adalah lebih fokus kepada Sistem Kafala yang dianut pemerintah Qatar pada masalah pekerja migran yang selama ini terjadi di Qatar dan peran pemerintah Qatar dalam menangani masalah tersebut khususnya dalam persiapan Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2022 di Qatar.

1.5 Cakupan Penelitian

Dalam penelitian ini akan membahas suatu masalah yaitu masalah sistem Kafala yang dinilai memiliki masalah eksploitasi tenaga kerja yaitu pekerja migran yang sedang bekerja di Qatar. penelitian ini akan fokus membahas bagaimana Dampak sistem kafala pada kasus pekerja migran tersebut dalam persiapan Qatar menjadi tuan rumah piala dunia 2022. Masalah pekerja migran ini akan dibahas pada suatu daerah di Asia Barat tepatnya berada di negara Qatar.

1.6 Tinjauan Pustaka

Karena fokus pembahasan dalam riset ini adalah Peran pemerintah Qatar dalam menanggapi masalah kerja paksa pekerja migran Piala Dunia 2022 di Qatar. Oleh karena itu penulis akan mencoba menggunakan beberapa tulisan yang membahas tentang apa saja yang dialami oleh pekerja migran dalam persiapan Qatar sebagai tuan rumah Piala dunia tahun 2022. Setelah penulis melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa penelitian yang memiliki ketertarikan yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Penelitian pertama yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Pette Pattisson pada tahun 2016 yang berjudul “Revelead: Qatar’s World Cup ‘slaves’”. Penelitian ini berfokus kepada penemuan-penemuan yang ditemui oleh peneliti tentang bagaimana pekerja migran Piala Dunia 2022 di Qatar diperlakukan secara tidak manusiawi. Penemuan yang peneliti temukan antara lain beberapa pria yang berasal dari Nepal mengaku bahwa mereka belum dibayar upah nya selama berbulan-bulan dan upah mereka dimanfaatkan agar mereka tidak dapat melarikan diri. Temuan berikutnya adalah para pekerja migran tersebut mengalami tindakan intimidasi seperti passpor mereka disita dan tidak diberikan ID atau tanda pengenal resmi sebagai pekerja yang legal. Pada penelitian ini juga ditemukan para pekerja tersebut tidak diberi akses untuk air bersih dan air minum gratis. Penelitian ini berfokus kepada tindakan apa saja yang dialami oleh migran tersebut, peneliti ingin mengumpulkan bukti bahwa proses pengerjaan konstruksi Piala Dunia 2022 di Qatar. Sehingga penelitian yang dilakukan oleh Pette Pattisson tersebut berhasil membuktikan bahwa pekerja migran di Qatar mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi (Pattisson, 2013).

Selanjutnya dalam Jurnal yang berjudul “Leveraging the World Cup: Mega Sporting Events, Human Rights Risk, and Workers Welfare Reform in Qatar” yang ditulis oleh Sarath K. Ganji menjelaskan bahwa Qatar menggelontorkan dana yang sangat besar dalam mempersiapkan Piala Dunia 2022. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa proyek Piala Dunia 2022 ini menjadi proyek terbesar yang pernah dibuat oleh Qatar. Dalam jurnal ini penulis mencoba menjelaskan undang-undang buruh yang berlaku di Qatar tidak sejalan dengan perlakuan yang diterima oleh pekerja migran

yang bekerja dalam mempersiapkan Piala Dunia tahun 2022. Mekanisme recruitment yang sama sekali tidak sesuai dengan undang-undang buruh dan pekerja juga menjadi bahasan pokok yang dibuat oleh penulis dalam jurnal ini. Dalam jurnal ini juga dijelaskan bahwa pekerja migran berpeluang menjadi korban perdagangan manusia karena para pekerja tersebut datang secara ilegal ke Qatar. Penulis berfokus kepada hak dan perlindungan yang harus diterima pekerja migran harus sesuai dengan undang-undang yang sudah berlaku di Qatar (Ganji, *Leveraging the World Cup: Mega Sporting Events, Human Rights Risk, and Worker Welfare Reform in Qatar*, 2016).

Berikutnya di Bab 9 yang berjudul “Social Suffering and Structural Violence: Nepali Workers in Qatar” dalam buku Antonio Donini yang berjudul “Tackling Today’s Dilemmas and Tomorrow’s Challenges” menjelaskan antara hubungan kerjasama Qatar dan Nepal terhadap pekerja migran. Dalam buku ini dijelaskan bahwa ada sekitar 400.000 pekerja migran yang berasal dari Nepal datang ke Qatar untuk menjadi buruh. Mereka dieksploitasi dan mendapatkan diskriminasi yang kemudian dijadikan sebagai salah satu agenda dalam pembangunan konstruksi persiapan Piala Dunia tahun 2022 di Qatar. Dalam buku ini diuraikan bagaimana para pekerja migran yang berasal dari Nepal sangat kesulitan bertahan hidup di Qatar. Setiap hari bahkan kedutaan besar Nepal di Doha selalu mendapatkan pengaduan-pengaduan terkait diskriminasi yang dialami oleh mereka. Pemerintah Qatar terkesan tidak memperdulikan keadaan pekerja migran yang berasal dari Nepal di Qatar. Perlakuan yang diterima oleh para pekerja migran Nepal di Qatar ini menurut penulis dalam buku ini dapat dikategorikan sebagai structural violence (Donini, 2019).

Penelitian berikutnya yang ditemukan adalah jurnal yang berjudul “FIFA’s Calling Giving Qatar the Red Card” yang ditulis oleh Shahrukh Khan. Dalam jurnal ini penulis berfokus kepada kafala system yang dianut oleh Qatar. Kafala System adalah sistem yang berkaitan dengan tenaga kerja yang dianut oleh beberapa negara seperti Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Uni Emirat Arab dan Qatar. Qatar dinilai menjadi negara yang paling berpengaruh dalam kafala system karena Qatar dinilai sangat membutuhkan pekerja migran karena populasi penduduk Qatar yang dinilai sangat sedikit. Penulis menjelaskan bahwa Qatar sangat membutuhkan

pekerja migran, namun ketika membangun arena olahraga termasuk pembangunan proyek Piala Dunia 2022 ini Qatar tidak mementingkan nasib para pekerja migran yang ada di negara mereka. Penulis juga menjelaskan FIFA sebagai organisasi tertinggi dalam sepakbola harus memberi sanksi yang tegas kepada Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia tahun 2022 karena akibat perlakuan yang dilakukan oleh pemerintah Qatar, proyek Piala Dunia 2022 dinilai sudah melanggar HAM karena lebih dari 1,200 pekerja meninggal dunia dalam rangkaian pembangunan konstruksi Piala Dunia 2022 di Qatar (Khan, 2019).

Pada penelitian berikutnya yaitu jurnal yang berjudul “Sweat Makes The Green Grass Grow: The Precarious Future of Qatar’s Migrant Workers in the run up to to The 2022 Fifa World Cup Under The Kafala system and recommendations for effective reform” yang ditulis oleh Paula Renkiewicz menjelaskan bahwa Kafala System yang sampai sekarang menjadi sistem yang dianut Qatar dalam memperlakukan pekerja migran harus segera dikaji ulang. Menurut penulis dalam jurnal nya Kafala System hanya akan membuka pintu bagi pemerintah Qatar dalam memperlakukan pekerja migran secara tidak manusiawi. The Kafala System memberi peluang lebih besar untuk terjadinya intimidasi, kriminalisasi bahkan perdagangan manusia karena regulasi nya yang terkesan tidak memihak para pekerja migran. Penulis dalam jurnal ini merekomendasikan Pemerintah Qatar untuk meninjau ulang The Kafala System karena hanya akan memberatkan pekerja-pekerja migran di Qatar (Renkiewicz, 2018).

Pembahasan-pembahasan pada literatur sebelumnya telah dipaparkan bagaimana masalah yang dihadapi oleh pekerja-pekerja migran yang ada di Qatar. Pada literature pertama membahas tentang perlakuan yang diterima oleh pekerja migran di Qatar, literatur tersebut mengambil sample yaitu mewawancarai para pekerja migran, namun pada tulisan tersebut tidak diambil sample yaitu mewawancarai para bos/majikan pekerja migran, literatur tersebut menjadi terkesan kurang dan seharusnya bisa ditambahkan pendapat-pendapat para bos/majikan pekerja migran yang ada. Pada literatur kedua membahas tentang regulasi atau undang-undang pekerja/buruh yang tidak diterapkan di Qatar, namun pada literatur tersebut tidak dipaparkan solusi atas masalah tersebut. Pada literatur ketiga berfokus kepada pekerja Nepal yang ada di Qatar, namun pada tulisan tersebut

tidak dipaparkan data yang jelas dari pemerintah Nepal menanggapi masalah pekerja migran asal Nepal di Qatar tersebut. Pada literatur keempat membahas tentang peran FIFA sebagai organisasi tertinggi di sepakbola dalam menangani masalah pekerja migran di Qatar, namun pada literatur ini tidak dijelaskan bagaimana hubungan antara FIFA dengan pemerintah Qatar itu sendiri. Pada literatur kelima berfokus kepada Kafala System yang dianut oleh Qatar, namun pada literatur tersebut tidak dipaparkan sebuah solusi tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh Qatar karena Kafala System dinilai sudah tidak relevan.

Maka dari itu sangat penting bagi penulis dalam penelitian ini untuk membahas Dampak sistem Kafala dalam kasus kerja paksa pekerja migran dalam persiapan Piala Dunia tahun 2022 dan bagaimana peran pemerintah Qatar dalam menangani masalah pekerja migran Piala Dunia 2022. Penelitian ini akan melengkapi ataupun menambah perspektif lain dari masalah pekerja migran di Piala dunia Qatar 2022. Penulis akan membahas bagaimana peran pemerintah Qatar dalam menangani masalah pekerja migran Piala Dunia 2022 ini. Lewat penelitian ini penulis juga akan menganalisis dan menawarkan solusi apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Qatar dalam menangani masalah pekerja migran Piala Dunia 2022.

1.7 Landasan Teori/Konsep/Model

Pada tulisan penelitian ini, peneliti akan menggunakan konsep Human Security: Personal Security dan Economic Security. Konsep ini pertama kali dibuat oleh United Nations Development Programme pada tahun 1994. Definisi dari konsep Human Security adalah untuk memahami adanya kerentanan di dunia global tentang gagasan tradisional tentang keamanan nasional yang selalu dikaitkan dengan sektor militer. Padahal selain sektor militer, masih banyak sektor dalam keamanan yang juga tidak kalah penting nya. Diantara nya yaitu Personal Security, Economic Security, Food Security, Health Security, Environmental Security, Community Security dan Political Security. Saat ini bagi banyak orang tidak ada tempat yang benar-benar aman, karena konflik sudah bisa diidentifikasi dengan berbagai banyak jenis seperti krisis yang berkepanjangan, bencana alam, kemiskinan yang berkepanjangan serta kemerosotan ekonomi dan pandemic. Krisis

ini tidak mengenal batas negara lagi atau bisa dikatakan lebih dinamis (UNDP, 1994) .Konsep ini dibuat karena seiring berkembangnya dunia internasional, keamanan militer bukan satu-satunya bagian terpenting di dalam dunia Internasional. Dalam tatanan dunia Internasional sekarang kemiskinan, kelaparan, Human Trafficking, kekerasan pada etnis, perubahan iklim dan sebagainya menjadi sebuah hal yang penting, bukan hanya ancaman dari luar yang melibatkan militer. Konsep Keamanan manusia juga dibutuhkan dalam menanggapi ancaman-ancaman yang tidak hanya melibatkan faktor eksternal dalam negara, melainkan faktor internal dalam sebuah negara seperti kemiskinan kronis hingga perdagangan manusia. Konsep keamanan manusia juga diperlukan sebagai sebuah pendekatan komprehensif untuk mengatasi ancaman secara lebih terintegrasi (Nations).

Dalam pendekatannya, Keamanan manusia memiliki 5 pendekatan atau sering juga disebut sebagai Human Security Principles and Approach, yaitu:

- People Centered: Berfokus terhadap individu ataupun komunitas dalam menangani atau mengidentifikasi suatu masalah. Dalam menangani suatu masalah, peran individu ataupun kelompok menjadi peran yang utama.
- Multi Sectoral: Melibatkan pihak-pihak yang berada di berbagai bidang dalam menangani suatu masalah yang berkaitan dengan sektor keamanan.
- Comprehensive: Melakukan identifikasi terhadap keseluruhan, atau bisa dikatakan melihat suatu masalah dari tujuh komponen dari Human Security.
- Context-specific: Berfokus terhadap target utama dalam mengidentifikasi suatu masalah. Mengidentifikasi kebutuhan yang konkrit dari suatu komunitas yang terdampak dan memberikan solusi yang tepat.
- Prevention-oriented: Mengidentifikasi risiko serta ancaman dan mencari akar penyebabnya. Berfokus terhadap pencegahan (United Nations Trust Fund for Human Security).

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan konsep Personal Security. Personal Security adalah salah satu turunan dari konsep Human Security itu sendiri. Personal Security mencakup keamanan terhadap suatu individu dari kemiskinan,

kekerasan dan kelaparan. Konsep Personal Security dapat dikaitkan dengan topik penelitian ini. Karena kasus yang terjadi di Qatar berkaitan dengan konsep Personal Security itu sendiri. Karena pekerja migran disini dikategorikan sebagai Personal yang terancam. Sistem Kafala menjadi fokus utama yang akhirnya menjadi pokok pembahasan peneliti. Perlakuan yang didapatkan oleh para Pekerja Migran di Qatar termasuk dalam konsep Personal Security. Menurut UNDP, ada jenis-jenis ancaman yang termasuk dalam konsep Personal Security, komponen-komponen tersebut adalah:

- *Threats from the state (physical torture)*: Mempunyai definisi yaitu ancaman yang datang dari negara asal, ancaman yang dapat dikatakan sebagai *threats from the state* adalah ancaman berupa penyiksaan/kekerasan fisik. Contoh nya adalah kekerasan yang dilakukan oleh aparat yang berasal dari negara korban itu sendiri.
- *Threats from other states (war)*: Mempunyai definisi sebagai ancaman yang datang dari luar negara asal, ancaman tersebut berasal dari negara lain. Dalam artian ancaman tersebut umumnya berupa perang. Perang tersebut kemudian mengancam Personal Security orang yang berada dalam negara tersebut.
- *Threats from other group of people (ethnic tension)*: Mempunyai definisi yaitu ancaman yang berasal dari suatu suku atau etnik yang kemudian mengancam suku atau etnik lainnya. Adanya konflik antara dua suku atau etnik tersebut dapat menyebabkan terjadinya ancaman terhadap orang-orang yang ada dalam kelompok atau etnik tertentu.
- *Threats from individuals or gangs against other individuals gangs*: Mempunyai definisi yaitu sebuah ancaman dari sekelompok orang yang kemudian membuat identitas mereka sendiri sebagai satu kelompok/*gang*. Ancaman tersebut bisa berasal dari individu yang menyerang sekelompok orang/*gang* atau pun sekelompok orang//*gang* yang menyerang seseorang/individu sehingga Personal Security nya terancam.
- *Threats directed against women*: Mempunyai definisi yaitu ancaman yang ditujukan khusus kepada perempuan. Bentuk ancaman ini bisa terjadi di kondisi apapun, salah satu bentuknya adalah pemerkosaan dan kekerasan terhadap perempuan.

- *Threats directed at children*: Mempunyai definisi yaitu bentuk ancaman/kekerasan yang ditujukan khusus kepada anak-anak. Bentuk ancaman ini juga bisa terjadi di kondisi apapun dimana anak-anak menjadi korban kekerasan sehingga Personal Security dari anak tersebut terancam.

- *Threats to self (suicide, drug use)*: Mempunyai definisi yaitu tindakan ancaman yang dilakukan seseorang terhadap dirinya sendiri yang diakibatkan kondisi tertentu. Salah satu contoh nya adalah jika suatu individu atau seseorang berada dalam tekanan tertentu.

Pada penelitian ini, penulis akan memasukkan salah satu komponen dari ancaman menurut Personal Security. Komponen ancaman yang akan dipakai tersebut adalah *Threats to Self*, karena komponen tersebut berkaitan dengan masalah yang terjadi terhadap Sistem Kafala dan Pekerja Migran di Qatar (UNDP, 1994). Komponen *Threats to self* dipakai karena menurut penulis komponen tersebut relevan dengan masalah yang dihadapi oleh para pekerja migran Piala Dunia Qatar tahun 2022. *Threats to self* yang mempunyai definisi ancaman yang dilakukan seseorang terhadap dirinya sendiri diakibatkan adanya kondisi atau keadaan yang membuat suatu individu merasa tidak nyaman. Individu tersebut pada penelitian ini adalah para pekerja migran Piala Dunia Qatar tahun 2022. Keadaan yang menimpa para pekerja migran tersebut menyebabkan psikis dari para pekerja migran tersebut terganggu sehingga kasus seperti bunuh diri yang dilakukan oleh para pekerja migran bisa terjadi.

Konsep Economic Security juga dipakai oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. Economic Security merupakan konsep dimana setiap individu pantas untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi serta perlindungan pekerjaan, oleh karena itu kasus pekerja migran di Qatar berkaitan dengan aspek ekonomi dari Qatar maupun pekerja migran itu sendiri. Economic Security memiliki definisi yaitu suatu konsep yang menegaskan bahwa akses untuk mendapatkan sumber daya, keuangan dan pasar menjadi sebuah elemen yang penting dalam keberlangsungan hidup ataupun keketahanan dalam suatu negara. Upaya untuk memenuhi sebuah kebutuhan yang berhubungan dengan bidang ekonomi adalah sesuatu yang cukup signifikan bagi individu maupun kelompok. Menurut

UNDP, Adapun komponen dalam Economic Security yang merupakan konsep perlindungan, antara lain:

- Assured access to basic income: Mempunyai definisi yaitu akses terhadap pendapatan. Dalam artian Economic Security mempunyai konsep bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan hak atau pendapatan nya masing-masing.
- Public and private sector employment: Mempunyai definisi yaitu setiap sektor yang mempekerjakan seseorang termasuk sektor publik/privat harus menjamin bahwa setiap orang yang dipekerjakan mendapatkan apa yang seharusnya merupakan hak nya.
- Government financed social safety nets: Mempunyai definisi bahwa setiap pemerintahan mempunyai tanggung jawab untuk memiliki cadangan keuangan yang dibutuhkan untuk sektor-sektor sosial.
- Diversify agriculture and economy: Mempunyai definisi bahwa peanekagaraman dalam bisdang agrikultur dan bidang ekonomi dibutuhkan agar terwujudnya kestabilan ekononomi.

Dalam penelitian ini, penulis akan memakai strategi *Assured access to basic income* untuk menganalisis bagaimana para pekerja migran tersebut mendapatkan akses untuk mendapatkan jaminan terhadap pendapatan ataupun dalam penelitian ini adalah gaji/upah yang harus dibayarkan (UNDP, 1994). Karena pada praktik nya, para pekerja migran tersebut tidak mendapatkan upah yang seharusnya mereka dapatkan, oleh karena itu komponen *Assured access to basic* merupakan komponen yang relevan untuk dipakai dalam menganalisis masalah pekerja migran Piala Dunia Qatar tahun 2022.

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan metode kualitatif, dikarenakan metode ini dianggap sebagai salah satu metode yang tepat untuk memenuhi tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penelitian

ini tidak akan menggunakan berbagai macam prosedur angka dalam proses pengumpulan data. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif yang kemudian menggunakan analisis yang mendalam. Penelitian kualitatif ini lebih mengedepankan bagaimana cara mencari makna, pengertian, pemahaman mengenai suatu fenomena atau peristiwa yang diangkat dalam sebuah penelitian. (Sugiarto, 2015).

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian yang berjudul Kebijakan Sistem Kafala Pemerintah Qatar terhadap Pekerja Migran Piala Dunia 2022 yaitu Sistem Kafala. Sistem Kafala menjadi inti dari penelitian ini, karena dari Sistem Kafala peraturan tersebut hingga akhirnya dipakai oleh Pekerja Migran. Objek penelitian ini adalah Pekerja Migran. Para Pekerja Migran yang mendapatkan perlakuan secara tidak adil dikarenakan adanya Sistem Kafala yang dianut oleh Qatar.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian secara kualitatif ini akan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dan dikumpulkan melalui pihak-pihak lain. Data yang akan didapatkan berupa sebuah informasi yang dilakukan melalui data-data yang telah dibuat sebelumnya. Selain menggunakan buku, jurnal, majalah dan dokumen, peneliti juga akan mencari literatur yang akan bersangkutan dengan penelitian serta mengakses perpustakaan elektronik seperti Sci Hub, Proquest, Libgen, JSTOR serta median relevan lainnya.

4. Proses Penelitian

Pada proses pengumpulan data dalam penelitian ini penulis akan melakukan kajian pustaka untuk memastikan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Penulis juga melakukan tinjauan pustaka yang berguna untuk menemukan data-data penting yang kemudian akan diangkat dalam penulisan skripsi untuk menemukan sebuah sisi keunikan

dalam penelitian ini. Setelah itu peneliti akan mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku, dokumen resmi, jurnal maupun internet. Data-data yang digunakan akan menjadi data pendukung untuk peneliti dalam mendukung argumen peneliti. Setelah semua data terkumpul, peneliti akan mengumpulkan data tersebut dan mengolah menjadi kata yang sederhana sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti.



BAB II

QATAR SEBAGAI TUAN RUMAH PIALA DUNIA 2022 DAN PERMASALAHANNYA

2.1 Terpilih nya Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022

Jika dilihat dari segi Geografis, Qatar bukan merupakan negara yang luas dan tergolong memiliki wilayah yang luas. Qatar memiliki luas wilayah sekitar 11,581 kilometer persegi dengan populasi penduduk sekitar 2 Juta. Qatar termasuk salah satu negara yang berada di Asia Barat. Qatar tergolong sebagai negara yang terus maju dan berkembang, mereka mempunyai cadangan minyak yang cukup banyak sehingga Qatar dapat membangun infrastruktur yang bisa dikatakan sebagai infrastruktur kelas dunia. Qatar juga merupakan salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia yaitu sekitar 175 Milliar US Dollar pada tahun 2019. Piala Dunia merupakan salah satu event terbesar di dunia, biaya untuk menjadi tuan rumah dan menyiapkan segala bentuk persiapan memerlukan biaya yang tidak murah. Brazil yang menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2014 mengeluarkan biaya 15 Milliar US Dollar. Rusia yang menjadi tuan rumah pada tahun 2018 mengeluarkan biaya 11 Milliar US Dollar. Qatar yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia pada tahun 2022 diperkirakan akan mengeluarkan biaya paling mahal sepanjang sejarah Piala Dunia yaitu sekitar 220 Milliar US Dollar (Krieg, 2021).

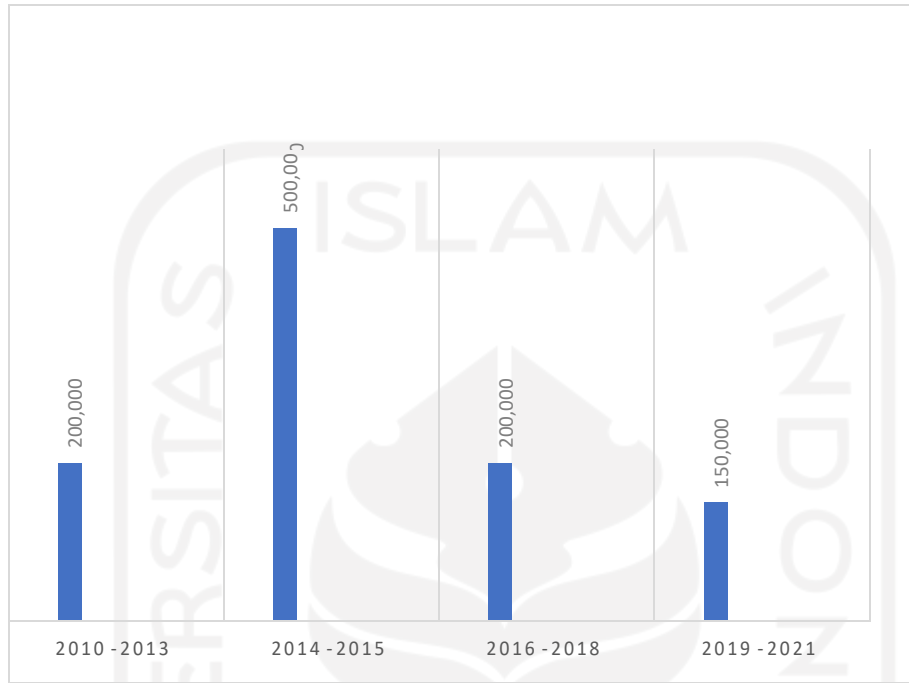
Dari data-data yang terlampir menunjukkan bahwa Qatar sangat serius dalam mempersiapkan perhelatan akbar yang akan berlangsung pada tahun 2022. Namun proses hingga kemudian dapat terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia bukan merupakan hal yang mudah. Banyak kriteria dan syarat yang dibuat oleh FIFA (Federation International Football Association) agar sebuah negara dapat terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia. Terpilih nya Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia tahun 2022 cukup mengejutkan dunia internasional. Banyak faktor yang membuat Qatar menjadi sorotan karena terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2022. Qatar yang tergolong bukan negara yang memiliki wilayah yang luas merupakan salah satu contoh mengapa dunia internasional menyoroti terpilih

nya Qatar. Piala Dunia membutuhkan infrastruktur yang banyak dan salah satunya adalah stadion. Syarat untuk menyelenggarakan Piala Dunia adalah memiliki stadion kelas dunia dan mempunyai stadion yang banyak sehingga dapat menggelar pertandingan Piala Dunia dari fase grup hingga final (BBC, 2017).

Terpilihnya Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2022 merupakan salah satu kejadian kontroversial dalam sejarah sepak bola dan sejarah Piala Dunia. Karena negara dengan penduduk hanya sekitar 2 juta dan wilayah yang tergolong tidak terlalu luas berhasil terpilih menjadi tuan rumah perhelatan akbar yaitu Piala Dunia. Salah satu yang menjadi sorotan berikutnya adalah Qatar merupakan negara yang memiliki suhu udara cukup panas. Seperti yang kita tahu mayoritas pemain-pemain yang bermain di Piala Dunia adalah pemain yang terbiasa bermain di Eropa atau bisa dibilang pemain yang terbiasa dengan suhu dingin. Hal ini menjadi pertimbangan sekaligus menjadi sorotan dunia Internasional apakah Piala Dunia di Qatar dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana atau malah suhu yang panas menjadi kendala yang besar ketika pertandingan berlangsung (Qatar Day, 2020). Qatar kemudian menjawab keraguan dunia internasional tentang suhu udara yang panas dengan menggunakan teknologi pendingin di seluruh stadion yang akan menyelenggarakan Piala Dunia tahun 2022. Qatar terbukti sangat serius dalam mempersiapkan penyelenggaraan Piala Dunia 2022. Dari mulai sisi infrastruktur hingga gelontoran dana yang dikeluarkan demi berlangsungnya event akbar 4 tahunan ini. Namun dibalik itu semua muncul isu yang memiliki konotasi negatif terhadap terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia tahun 2022.

Keputusan FIFA yang akhirnya memilih Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 sering dikaitkan dengan kasus korupsi atau suap antara Qatar sebagai pihak penyelenggara dan FIFA sebagai badan yang menunjuk Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Petinggi badan sepak bola Asia atau Asian Football Federation (AFC) dan FIFA dikaitkan dengan kasus korupsi dan suap. Jack Warner yang menjabat sebagai vice president FIFA pada saat itu menerima dana sebesar 2 Milyar Dollar US yang kemudian digunakan untuk memenangkan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Tuduhan demi tuduhan terus berdatangan mengiringi persiapan Qatar menuju tahun 2022. Kontroversi demi kontroversi mengiringi persiapan Qatar dalam menyambut Piala Dunia 2022, kasus yang paling di sorot

oleh dunia internasional adalah yang menimpa pekerja migran yang bekerja untuk mempersiapkan seluruh infrastruktur penunjang Piala Dunia 2022 di Qatar. Banyak yang menganggap bahwa Qatar tidak pantas untuk menyelenggarakan Piala Dunia karena telah melanggar hak asasi manusia.

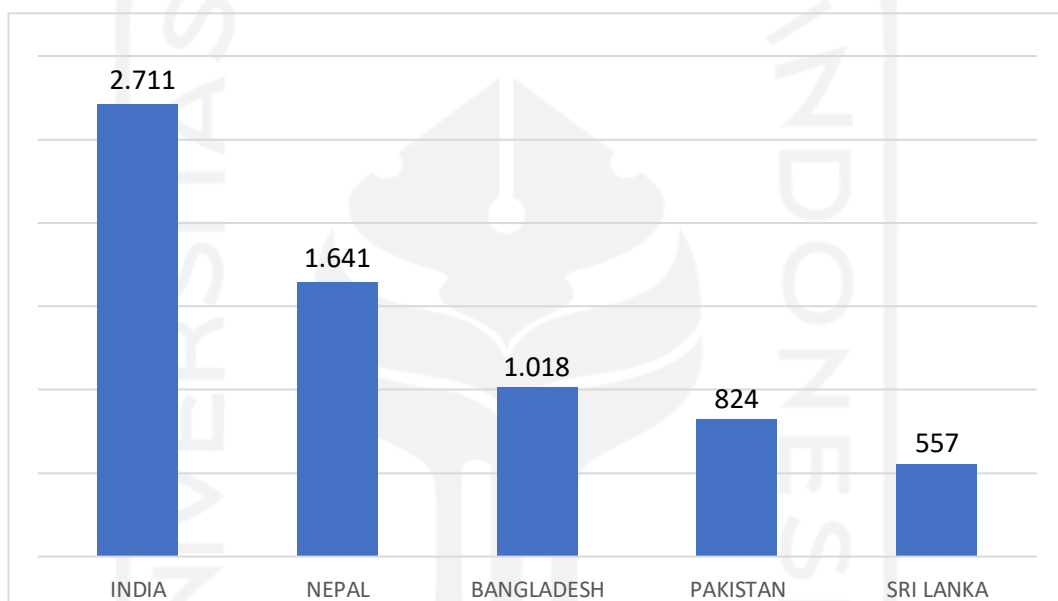


Grafik 2.1 Data Pertumbuhan Jumlah Pekerja Migran pada Proyek Piala Dunia 2022 (Sumber: Amnesty International)

2.2 Kondisi pekerja Migran di Qatar

Pekerja migran adalah orang yang memutuskan untuk bermigrasi di negara asalnya atau di luar negara asalnya untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Para buruh migran biasanya tidak memiliki niat untuk tinggal secara permanen di negara ataupun wilayah tempat mereka bekerja. Dari data yang dihimpun oleh United Nations/Department of Economic and Social Affairs (UN/DESA) jumlah imigran internasional mencapai angka 258 juta orang, sedangkan jumlah pekerja migran mencapai angka 164 juta orang. Data tersebut membuktikan bahwa semakin banyak orang yang membutuhkan pekerjaan hingga orang tersebut memilih untuk pindah ke negara lain demi mendapatkan sebuah pekerjaan. Angka tersebut semakin bertambah seiring perkembangan zaman yang semakin pesat. Namun semakin banyak jumlah pekerja migran yang bertambah, juga semakin membuat

permasalahan semakin bertambah. Mulai dari peraturan hingga legalitas seorang imigran yang sering sekali dimanfaatkan oleh oknum-oknum agar mendapatkan keuntungan demi biaya yang lebih murah. Peraturan yang terkadang berbeda di tiap-tiap negara juga menjadi akar masalah karena sampai saat ini masih banyak kasus-kasus yang menyudutkan pekerja migran sehingga keselamatan serta kesejahteraan pekerja migran masih sering menjadi perhatian. Perlindungan terhadap pekerja migran masih tergolong sangat lemah.



Grafik 2.2 Data Pekerja Migran Proyek Piala Dunia 2022 Asal Asia Selatan Yang Meninggal Dunia Dari Tahun 2011-2020 (Sumber: The Guardian)

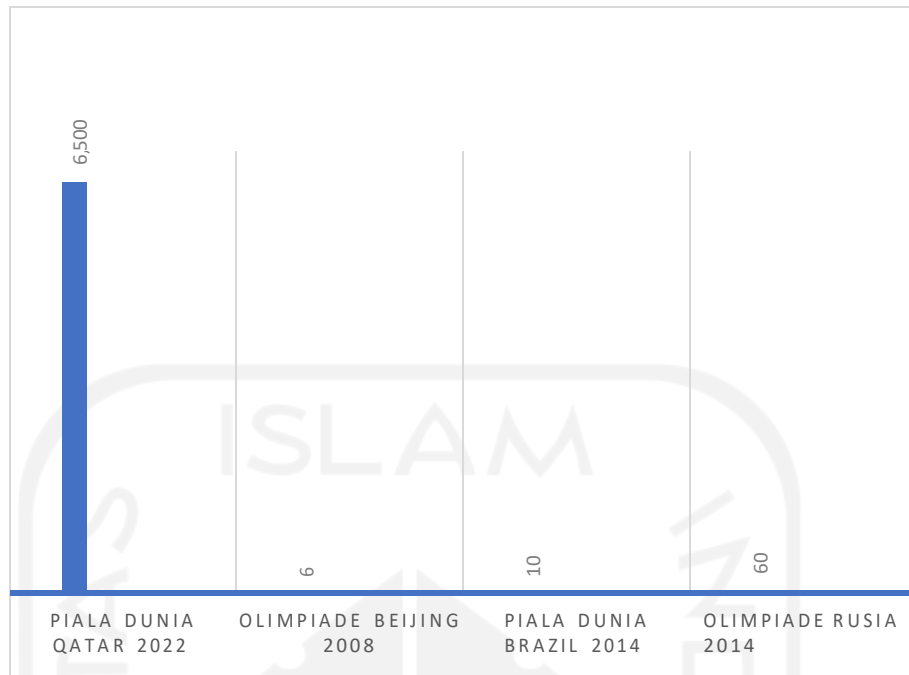
Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana kondisi pekerja migran yang dipekerjakan untuk mempersiapkan Piala Dunia tahun 2022. Organisasi dan Lembaga yang berfokus terhadap Hak Asasi Manusia serta perlindungan pekerja seperti Amnesty International sudah berusaha untuk mengangkat kasus ini ke dunia internasional, sudah banyak pihak-pihak yang merespons terhadap kondisi pekerja migran di Qatar. Namun meski sudah banyak Lembaga internasional yang menyoroti secara serius kasus pekerja migran ini, sampai sekarang dari temuan yang dilakukan di lapangan ternyata masih ditemukan para pekerja migran yang tidak mendapatkan perlakuan yang layak. Kenyataan ini yang membuat bahwa kasus pekerja migran di Qatar harus segera di usut tuntas dan dicari akar dari

permasalahannya. Kondisi yang dialami oleh para pekerja migran tersebut bisa dibilang sangat tidak layak, seperti kamp tempat mereka tinggal yang sempit dan jorok serta kapasitas kamp yang melebihi kapasitas maksimal. Hal ini yang kemudian menjadi perhatian dunia internasional karena yang dialami oleh pekerja migran di Qatar merupakan salah satu peristiwa yang melanggar hak asasi manusia. The Guardian melaporkan pada bulan Maret 2021 sekitar 6,500 pekerja migran yang meninggal sejak Qatar ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia tahun 2022. Dari 6,500 pekerja migran yang meninggal berasal dari beberapa negara seperti India, Pakistan, Nepal, Bangladesh dan Sri Lanka (The Guardian, 2021).

Dalam data yang dihimpun, setidaknya ada sekitar 12 pekerja migran meninggal di Doha dalam sepekan yang berasal dari negara Asia Selatan ketika Qatar merayakan dipilih sebagai tuan rumah Piala Dunia tahun 2022. Data yang dihimpun dari India, Bangladesh, Nepal dan Sri Lanka ada sekitar 5,927 meninggal dunia dalam kurun waktu 2011 hingga 2020 (Owens, 2021). Kedutaan Pakistan menghimpun ada 824 orang pekerja yang berasal dari Pakistan meninggal dunia pada tahun 2010 hingga 2020. Data tersebut belum termasuk negara-negara yang tidak mengirim pekerja migran dalam jumlah yang besar seperti negara Filipina dan Kenya. Penyebab meninggal nya pekerja migran tersebut bermacam-macam namun bertitik pada pembangunan infrastruktur seperti pembangunan Stadion, Bandara Baru, Jalan, Sistem Transportasi Publik, Hotel hingga pembangunan kota baru yang akan menyelenggarakan Final Piala Dunia tahun 2022. Salah satu kasus yang paling menyita perhatian adalah Madhu Bollapally yang berumur 43 berasal dari India yang bekerja sebagai pekerja migran persiapan Piala Dunia Qatar tahun 2022, ia mulai bekerja pada tahun 2013. Pada tahun 2019 ia ditemukan oleh teman satu kamar nya dalam keadaan meninggal dunia dengan keadaan tubuh nya di lantai kamar nya (npr, 2021). Dalam upaya untuk mengungkap penyebab meninggal nya para pekerja migran tersebut, Pemerintah Qatar tidak pernah melakukan otopsi sehingga penyebab kematian para pekerja migran tersebut masih tanda tanya. Pandemi yang melanda dunia termasuk Qatar ternyata tidak terlalu berpengaruh terhadap angka kematian para pekerja migran, dari data yang dihimpun oleh The Guardian, angka kematian pekerja migran yang disebabkan oleh Covid-19 berjumlah 250 orang. Namun dari segala data yang diterima, Pemerintah Qatar

terkesan menutup-nutupi data angka kematian yang disebabkan oleh pembangunan infrastruktur Piala Dunia 2022 ini.

Kondisi ini semakin parah karena para pekerja migran tidak diperbolehkan untuk meninggalkan Qatar, mereka juga tidak diperbolehkan mengganti pekerjaan atau pun mengganti pekerjaan mereka. Para pekerja migran juga tidak dibayar atau tidak menerima gaji selama berbulan-bulan. Kondisi medan yang tergolong memiliki resiko yang tinggi serta suhu udara yang cukup panas hingga mencapai 120 derajat pada musim panas membuat resiko kecelakaan kerja yang dimiliki oleh para pekerja migran tersebut semakin tinggi. Data juga menunjukkan ada pekerja migran yang memilih untuk mengakhiri hidup nya atau bunuh diri di kamp. Kondisi yang telah dipaparkan membuktikan bahwa yang dialami oleh para pekerja migran tersebut merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan. Banyak juga pendapat yang berasal dari aktivis pembela Hak Asasi Manusia untuk memboikot Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia tahun 2022. Qatar dinilai gagal dalam mengedepankan aspek kemanusiaan dan hak asasi manusia karena angka kematian para pekerja nya cukup tinggi. Hal ini tidak hanya dipicu oleh tinggi nya angka kematian para pekerja, temuan demi temuan yang ditemukan oleh Lembaga hak asasi manusia internasional terkait perlakuan yang diterima oleh para pekerja migran juga menjadi salah satu alasan banyak pihak yang menyuarakan ingin memboikot Piala Dunia di Qatar tahun 2022. FIFA sebagai badan organisasi tertinggi dalam sepak bola terus menjalin hubungan dengan pemerintah Qatar terkait kasus yang dialami oleh pekerja migran tersebut. Namun baik pemerintah Qatar dan juga FIFA dinilai oleh sejumlah pihak tidak tegas dalam mengusut tuntas kasus pekerja migran ini. Saat ini proses pengerjaan infrastruktur Piala Dunia tahun 2022 masih terus berjalan, jumlah pekerja migran yang meninggal dunia diperkirakan akan terus bertambah hingga mendekati Opening Ceremony yang akan digelar pada November tahun 2022.



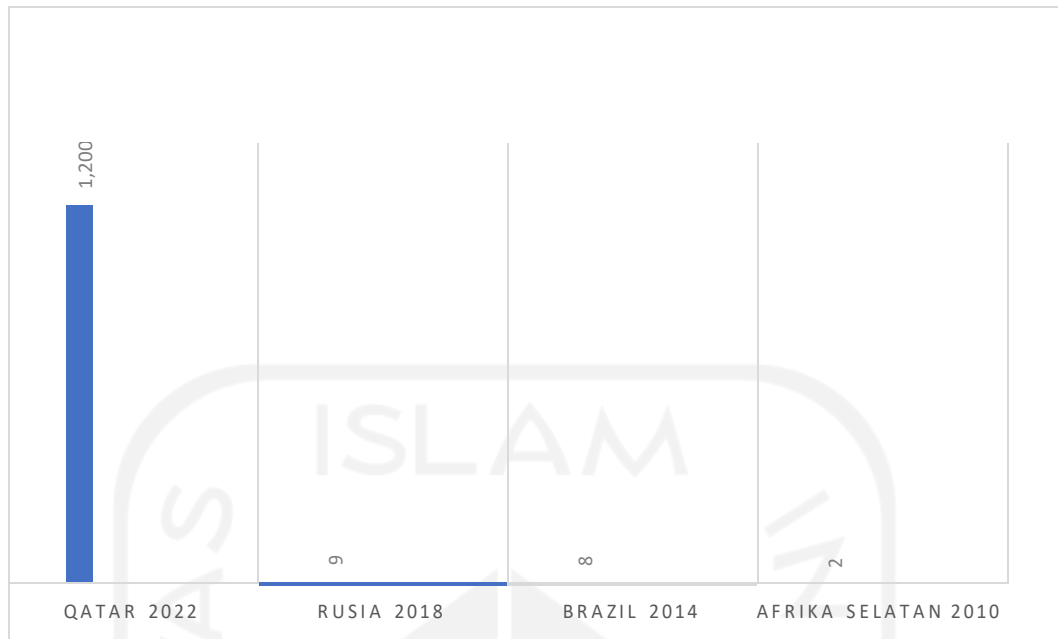
Grafik 2.3. Data Pekerja Migran yang meninggal di *event* olahraga.

Sumber:BBC

Sejak pandemi COVID-19 melanda dunia, semua negara serta semua bidang terkena dampak oleh COVID-19, termasuk para pekerja migran Piala Dunia 2022 di Qatar. Dari laporan yang di himpun oleh Euronews, para pekerja migran tersebut tidak menerima gaji selama pandemi COVID-19. Kondisi ini juga diperparah dengan resiko yang diterima oleh para pekerja migran karena Kesehatan mereka terancam akibat virus Corona yang bisa menular, para pekerja migran bekerja dalam kelompok yang banyak atau bisa dibilang bekerja dalam kerumunan, hal ini tentunya meningkatkan resiko penyebaran virus Corona. Virus corona juga berdampak terhadap pembangunan infrastruktur pembangunan hotel, bandara, stadion dan sarana prasana lainnya. Terkait hal tersebut, para pekerja migran kemudian menjadi pihak yang dirugikan karena selain menerima resiko terancam penyebaran Virus Corona, gaji atau upah yang mereka terima juga menjadi tersendat bahkan tidak menerima upah atau gaji sama sekali.

Perlakuan yang didapatkan oleh para pekerja migran tersebut membuktikan bahwa pemerintah Qatar tidak serius dalam menjamin Kesehatan serta keselamatan para pekerja migran. Namun ketika diberitakan dan dimuat di media-media internasional, Pemerintah Qatar selalu menyanggah bahwa mereka memperlakukan para pekerja migran dengan cara tidak manusiawi, Pemerintah Qatar selalu

menyangkal tuduhan tersebut. Pemerintah Qatar menyebutkan bahwa mereka selalu menjamin keselamatan para pekerja migran meskipun terkadang pemerintah Qatar tidak menyangkal fakta bahwa masih terjadi kelalaian yang kemudian berdampak terhadap kondisi para pekerja migran tersebut, namun ketika berbicara tentang data tinggi nya angka kematian serta banyak nya berita yang menyebutkan kondisi yang dialami oleh para pekerja migran, Pemerintah Qatar masih tegas dengan sikap nya yaitu mereka selalu memperhatikan kondisi para pekerja migran tersebut. Namun pada kenyataan nya berbeda. Kondisi ini sudah selayaknya diberikan perhatian yang sangat besar oleh pemerintah Qatar sendiri, terlebih Lembaga-lembaga Internasional yang bergerak di bidang hak asasi manusia juga semakin menekan adanya kasus yang melibatkan Pemerintah Qatar, FIFA sebagai badan tertinggi sepak bola dan para pekerja migran yang disini menjadi korban atas kasus ini. Persiapan Qatar dalam menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2022 semakin singkat, 1 tahun adalah sisa waktu yang dimiliki oleh Qatar untuk mempersiapkan segala aspek penunjang yang dibutuhkan untuk menjadikan Piala Dunia 2022 menjadi sebuah event akbar yang sukses dan kemudian Qatar bisa menjawab pertanyaan demi pertanyaan dan kritik yang selalu ditujukan kepada Qatar sebagai tuan rumah penyelenggaraan. Para pekerja migran juga sudah membuat beberapa Gerakan seperti melakukan demonstrasi untuk menuntut pemerintah Qatar dan FIFA dalam membenahi sistem kerja yang mereka dapatkan selama menjadi pekerja migran di Qatar (The Athletic, 2021).



Grafik 2.4 Data Pekerja bidang konstruksi yang meninggal pada 4 Piala Dunia terakhir. Sumber: *BBC*

2.3 Peran Pemerintah Qatar

Qatar sebagai negara penyelenggara Piala Dunia 2022 bertanggung jawab terhadap yang terjadi ketika persiapan dan sesudah Piala Dunia 2022 berlangsung. Kasus pekerja migran yang terjadi dalam proses pembangunan persiapan Piala Dunia tahun 2022 juga jelas menjadi tanggung jawab pemerintah Qatar. Jumlah pekerja migran yang tergolong cukup banyak menjadi tantangan bagi Pemerintah Qatar agar keselamatan para pekerja migran yang harus nya menjadi prioritas yang paling utama. Terlebih Piala Dunia merupakan event akbar yang sudah pasti mencuri perhatian dunia termasuk badan-badan atau Lembaga Internasional yang resmi, khusus nya Lembaga yang bergerak dan berfokus terhadap keselamatan kerja dan hak asasi manusia. Terpilih nya Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia tahun 2022 sudah menuai banyak kontroversi. Banyak aspek yang membuat penikmat sepak bola bahkan dunia internasional terkejut karena Qatar ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah, mulai dari negara yang menjadi lawan Qatar dalam *bidding* (pemilihan tuan rumah) yang merupakan negara-negara yang dinilai lebih siap dibanding Qatar. Korea Selatan dan Amerika adalah negara yang mencalon

kan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia tahun 2022. Jika dilihat dari aspek geografis, Korea Selatan dan Amerika Serikat jauh lebih unggul ketimbang Qatar, apalagi ketika dilihat dari kondisi suhu udara yang dimiliki oleh Qatar. Suhu udara yang cukup panas juga menjadi sorotan dunia internasional. Jika dilihat dari luas wilayah yang dimiliki oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat, dua negara ini jauh lebih luas ketimbang Qatar. Namun ketika akhirnya Qatar secara resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia tahun 2022, Pemerintah Qatar harus siap dengan segala sorotan yang tertuju oleh negara mereka. Sejak terpilih nya Qatar sebagai tuan rumah pada 9 Desember 2010, dunia internasional selalu memantau perkembangan Qatar dalam mempersiapkan pesta sepak bola terbesar di seluruh dunia ini. Kasus pekerja migran akhirnya menjadi bukti bahwa Qatar selalu menjadi perhatian oleh dunia internasional. Terlebih kasus pekerja migran yang semakin hari semakin bertambah banyak. Dari laporan yang ditulis oleh Human Rights Watch, pemerintah Qatar dinilai gagal dalam melindungi hak asasi manusia para pekerja migran mereka. Sejak 2010 hingga 2020 pemerintah Qatar terkesan tidak serius dalam menganggapi isu hak asasi manusia yang melibatkan para pekerja migran yang berada di Qatar. Seruan untuk melakukan boikot terhadap Piala Dunia 2022 (Human Rights Watch, 2020).

Pemerintah Qatar selaku penanggung jawab proyek Piala Dunia 2022 menjelaskan bahwa Sistem Kafala merupakan sistem yang sudah dipakai sejak lama. Pemerintah Qatar menganggap bahwa sistem tersebut merupakan sistem yang sudah relevan dan bisa dipakai untuk mengatur bagaimana para pekerja migran tersebut diatur dalam bekerja. Namun pemerintah Qatar juga mengaku bahwa sistem tersebut memudahkan adanya eksploitasi terhadap para pekerja migran tersebut. Pemerintah Qatar berencana untuk menghilangkan beberapa peraturan yang ada di Sistem Kafala, salah satunya adalah peraturan yang mengharuskan para pekerja migran mendapatkan izin dari majikan nya untuk meninggalkan Qatar, peraturan tersebut sudah di rencanakan oleh pemerintah Qatar untuk dihilangkan, ini merupakan salah satu bukti bahwa pemerintah Qatar berusaha untuk memperbaiki celah atau kemungkinan eksploitasi para pekerja migran tersebut. Dalam laporan yang dihimpun oleh *Council Foreign Affairs*, pemerintah Qatar berjanji akan menghilangkan peraturan izin meninggalkan Qatar yang sebelumnya

harus mendapatkan izin dari majikan/sponsor, pemerintah Qatar akan menghilangkan peraturan tersebut (Robinson, 2021).

Sistem Kafala dinilai menjadi inti dari permasalahan yang terjadi di Qatar, sistem tersebut dinilai tidak relevan sehingga yang terjadi kepada para pekerja migran yang ada di Qatar merupakan sesuatu yang harus segera diselesaikan dan dicari solusinya oleh pemerintah Qatar. Pemerintah Qatar sebagai pemegang kekuasaan atau *decision maker* didesak untuk segera mencari solusi terhadap apa yang terjadi dan menimpa pekerja migran di Qatar. Sistem Kafala sudah banyak di kritik oleh dunia internasional, pemerintah Qatar dinilai bertanggung jawab dan di kritik agar segera mengganti sistem yang memberatkan para pekerja migran dan dinilai hanya menguntungkan para pemangku kekuasaan demi untuk memangkas biaya pembangunan serta persiapan yang dibutuhkan dalam mempersiapkan segala sarana prasarana serta infrastruktur penunjang Piala Dunia tahun 2022. Pemerintah Qatar dinilai hanya serius dalam membangun segala bentuk infrastruktur, namun pemerintah Qatar tidak memberi perhatian yang lebih terhadap aspek kemanusiaan para pekerja migran yang juga berperan sangat penting dalam pembangunan infrastruktur. Jika dilihat dari segala aspek, para pekerja migran tidak kalah pentingnya ketimbang aspek yang lain. Pembangunan infrastruktur tidak akan berjalan secara lancar jika para pekerja migran tidak mendapatkan perlakuan yang pantas atau tidak mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Jika pemerintah Qatar serius dalam memperhatikan kesejahteraan serta keselamatan para pekerja migran mereka, pembangunan infrastruktur serta segala aspek penunjang Piala Dunia 2022 menjadi lebih lancar dan efisien. FIFA sebagai badan tertinggi sepak bola juga sudah mendesak agar pemerintah Qatar lebih serius dalam menangani kasus pekerja migran. FIFA juga terkena dampak akibat apa yang terjadi di Qatar. FIFA juga menjadi sorotan seperti Amnesty International mendesak agar pemerintah Qatar dan FIFA mencari solusi terhadap kasus yang dinilai sudah mencederai kedua belah pihak yaitu FIFA selaku badan yang menunjuk serta memilih Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia tahun 2022. Dari laporan terbaru yang dilaporkan oleh *The Athletic*, Pemerintah Qatar lewat badan kantor komunikasinya mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah Qatar sedang berusaha untuk memperbaiki standar keselamatan kerja serta Kesehatan para pekerja migran, pemerintah Qatar juga

mengeluarkan pernyataan bahwa mereka telah menambah jumlah orang yang ditunjuk sebagai pengawas yang bertugas untuk mengawasi perusahaan yang dinilai melanggar hukum dan merugikan para pekerja migran. Pemerintah Qatar juga menyampaikan bahwa mereka bekerja sama secara intens dan berkala dengan badan-badan serta Lembaga internasional seperti Amnesty International untuk mengawasi serta menjamin agar keselamatan para pekerja migran menjadi prioritas utama pemerintah Qatar.

Pernyataan yang disampaikan oleh pemerintah Qatar tersebut tidak langsung membuat dunia internasional mengalihkan perhatian nya terhadap apa yang terjadi di Qatar, Lembaga serta badan hak asasi manusia masih terus mengawasi para pekerja migran dan memastikan bahwa mereka mendapat perlakuan yang layak serta menerima hak yang seharusnya mereka terima. Peran pemerintah Qatar sampai saat ini dinilai hanya sebatas mengeluarkan pernyataan untuk meredakan kritik serta sorotan yang mereka terima, oleh karena itu para aktivis serta Lembaga internasional masih terus memantau perkembangan dan apa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Qatar. Para pekerja migran sempat melakukan aksi demonstrasi yang ditujukan ke pemerintah Qatar agar mereka tidak menerima perlakuan yang selama ini mereka dapatkan, pemerintah Qatar langsung merespon dengan mengeluarkan pernyataan untuk mulai tegas dalam memperhatikan nasib para pekerja migran tersebut. Para pekerja migran sebenarnya sudah melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan yaitu bertindak tegas dengan melakukan demonstrasi secara serentak untuk memberi sinyal kepada pemerintah Qatar bahwa mereka tidak seharusnya mengalami apa yang mereka alami saat ini. Kondisi yang terjadi di Qatar saat ini sudah jelas, para pekerja migran tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak mereka. Mulai dari gaji yang tertunda bahkan tidak dibayar sama sekali selama berbulan-bulan, jaminan Kesehatan yang sama sekali tidak menjamin Kesehatan para pekerja migran tersebut. Aspek Kesehatan juga berkaitan dengan tempat tinggal para pekerja migran yang sangat tidak layak huni, karena tempat tinggal yang mereka tempati sangat sempit dan kemudian dihuni oleh orang dengan jumlah yang sangat banyak. Maka sudah saatnya pemerintah Qatar melakukan hal yang tegas serta memberikan solusi atas apa yang terjadi terhadap para pekerja migran di Qatar (Fanack, 2019).

2.4 Penerapan Sistem Kafala

Sistem Kafala adalah sistem yang berfokus terhadap para pekerja asing atau pekerja migran. Sistem Kafala dibentuk oleh Gulf Corporation Council (GCC). Gulf Corporation Council adalah organisasi regional yang terdiri dari negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab. Tujuan dibentuk nya Gulf Corporation Council adalah untuk meningkatkan integrasi antar negara-negara teluk. Berbagai perjanjian dibentuk dan disahkan oleh GCC yang berhubungan dengan kepentingan antar negara-negara teluk. Sistem Kafala adalah salah satu contoh dari hasil perundingan yang dibuat oleh GCC. Sistem Kafala berfokus kepada para pekerja asing atau sering disebut sebagai pekerja migran yang datang dan bekerja di negara-negara teluk. Dihimpun dari International Labor Organization (ILO) Sistem Kafala pertama kali diterapkan pada tahun 1950 (Eickelberg, 2020). Sistem Kafala digunakan untuk mengatur kebutuhan dan hal-hal yang berhubungan dengan pekerja migran yang bekerja di negara teluk. Garis besar dari Sistem Kafala adalah adanya sponsor yang sering disebut sebagai majikan. Majikan tersebut bertanggung jawab terhadap para pekerja migran mulai dari sebelum kedatangan ke negara tempat ia bekerja, kedatangan ke negara tujuan bekerja, kehidupan pekerja migran selama menetap di negara tempat ia bekerja serta kepulangan pekerja migran Kembali ke negara asal nya. Tujuan dari Sistem Kafala sebenarnya adalah untuk menjamin segala kebutuhan seperti akomodasi, tempat tinggal, upah atau gaji serta Kesehatan dan jaminan keselamatan para pekerja migran terjamin dan mereka diperlakukan secara adil. Segala jaminan yang diberikan kepada para pekerja migran tersebut terikat dalam sebuah kontrak kerja. Dalam sistem Kafala, para pekerja migran terikat oleh para majikan nya. Dalam penerapannya di Qatar, Sistem Kafala juga dianut kepada para pekerja migran yang bekerja dalam pembangunan Piala Dunia Qatar tahun 2022. Sejak pembangunan awal yang dilakukan pada tahun 2010, Sistem Kafala menjadi acuan bagi para pekerja migran untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan bekerja serta ikut ambil bagian pada proyek pembangunan besar-besaran Piala Dunia 2022. Perusahaan-perusahaan yang ikut ambil bagian secara otomatis bertindak sebagai sponsor atau juga disebut majikan, bertanggung jawab penuh

terhadap para pekerja migran yang bekerja dalam proyek Piala Dunia 2022. Sejak tahun 2010 para pekerja migran mulai berdatangan karena proyek Piala Dunia 2022 ini adalah proyek yang besar dan membutuhkan sumber daya manusia yang sangat banyak. Namun seiring berjalannya waktu, penerapan Sistem Kafala menimbulkan celah atau pun tanda tanya besar di mata dunia internasional. Banyak yang mempertanyakan apakah sistem ini merupakan sistem yang relevan untuk diberikan kepada para pekerja migran yang bekerja dalam pembangunan infrastruktur penunjang Piala Dunia tahun 2022 (Venkataramakrishnan, 2015).

Dalam *Labour of Law* atau undang-undang buruh yang dimiliki oleh Qatar, terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang kedisiplinan para tenaga kerja termasuk pekerja migran, yaitu pada Article 58 dan 59 dalam *Labour of Law* yang berbunyi: *Article (58) An employer employing ten workers or more shall make penalties regulations specifying the violations and the penalties to be inflicted on the workers who commit these violations and the conditions and procedures for the infliction thereof.*

Article (59) The disciplinary penalties which may be inflicted on the workers are:

- 1. Notification, which shall be deemed to have been achieved by a written letter to the worker containing a notification of the violation he has committed and requesting him not to repeat the commission thereof and warning him of the infliction of a severer penalty in case of repetition.*

- 2. Deduction from the wage of the worker for a period not exceeding five days in respect of one violation.*

- 3. Suspension from work together with non-payment of the wage for a period not exceeding five days in respect of one violation*

- . 4. Suspension from work without payment or with reduced payment pending the adjudication upon the criminal charge attributed to the worker and if the worker is acquitted or if the charge against him has been dropped the suspension shall be deemed to have never taken place and the worker shall be paid his entitlements during the suspension period.*

- 5. Postponement of the grant of annual increment for a period not exceeding six months or the non-payment therefrom in the establishments which maintain increments systems.*

6. Postponement of promotion for a period not exceeding one year in the establishments which maintain promotion systems.

7. Dismissal from work with payment of the end of service gratuity.

8. Dismissal from work and non-payment of the end of service gratuity.

Secara garis besar dua pasal yang mengatur tentang kedisiplinan tersebut sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk dijadikan acuan dalam praktik mempekerjakan pekerja migran di Qatar. Namun masih ada Pasal yang memiliki kekurangan seperti Pasal 4 yang berbunyi penangguhan dari pekerjaan tanpa pembayaran sampai menunggu keputusan pidana. Pasal tersebut bisa dijadikan celah untuk menuduh para pekerja migran dan mereka otomatis tidak mendapatkan upah selama mendapatkan tuduhan tersebut. Pasal tersebut masih memiliki celah untuk terjadi nya eksploitasi. Dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang kedisiplinan dari tenaga kerja, seharusnya dalam praktik nya tidak ada kasus eksploitasi kepada tenaga kerja seperti yang terjadi dalam proyek pembangunan Piala Dunia tahun 2022.

Para pekerja migran menggantungkan diri sepenuhnya kepada para sponsor atau majikan mereka. Para pekerja migran tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas izin majikan mereka. Hal ini yang kemudian menimbulkan perdebatan apakah sebenarnya yang terjadi di Qatar merupakan sesuatu yang sudah dijalankan sesuai prosedur atau apakah Sistem Kafala merupakan sistem yang tidak relevan karena sistem tersebut malah memberatkan para pekerja migran dan hanya menguntungkan para sponsor. Dalam penerapannya Sistem Kafala sebenarnya dibuat agar para pekerja migran tidak bisa melakukan hal yang ada diluar peraturan. Salah satunya adalah keluar dari pekerjaannya tanpa seizin dari para majikan/sponsor. Pada awalnya peraturan ini dibuat untuk menghindari adanya kecurangan yang dibuat oleh para pekerja migran tersebut. Peraturan ini merupakan identitas dari Sistem Kafala itu sendiri berasal dari bahasa arab yaitu Kafala. Kafala dalam bahasa arab mempunyai arti memberi makan, mendukung, menjamin atau jaminan (Hassan). Menurut kamus bahasa Arab abad kesembilan belas, Kafala berarti tanggung jawab, tanggungan, penjaminan ataupun secara garis besar adalah penyatuan tanggung jawab kepada orang lain. Dalam tradisi islam, Kafala merupakan konsep penting yang memiliki dimensi sosial, moral dan bisnis. Dalam

hukum keluarga islam, Kafala mengacu pada perjanjian formal untuk memberikan dukungan sementara untuk anak yatim piatu sampai dewasa. Hal ini kemudian diimplementasikan oleh negara-negara Teluk khususnya Qatar. Sistem Kafala mempunyai *background* ajaran islam, salah satunya adalah bagaimana para sponsor atau majikan tersebut memperlakukan para buruh atau pun pekerja migran secara Kafala yaitu menjadi penanggung jawab serta menjamin keamanan para pekerja migran tersebut. Inilah yang kemudian menjadi ciri khas dari sistem Kafala itu sendiri. Namun hal ini juga yang memberi celah terhadap penyalahgunaan dari Sistem Kafala itu sendiri. Keluluasaan para majikan/sponsor ini yang akhirnya menjadi celah dan kemudian terjadi nya eksploitasi tenaga kerja. Pada awalnya fungsi dari peraturan bahwa pekerja migran dibawah tanggung jawab para majikan/sponsor adalah untuk menjamin keamanan serta kesejahteraan para pekerja migran, pada kenyataan nya ini merupakan sebuah celah sehingga terjadinya eksploitasi tenaga kerja hingga yang terjadi sampai saat ini. Hak yang dimiliki oleh para majikan/sponsor terlalu luas atau banyak, namun kenyataan nya kewajiban mereka untuk menjamin kesejahteraan serta keamanan para pekerja migran tersebut akhirnya tidak dilaksanakan. Hal tersebut menyebabkan para pekerja migran tidak bisa berhenti dari pekerjaan nya walaupun sudah mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, mereka tidak bisa keluar dari pekerjaannya karena mereka harus mendapatkan izin dari para majikan/sponsor, hal ini yang kemudian merupakan celah dari sistem Kafala itu sendiri (Pattisson P. , 2020).

Amnesty International adalah Lembaga pertama yang mengangkat isu ini, dari laporan yang mereka temui, ternyata para pekerja migran tersebut tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya mereka dapatkan. Amnesty International adalah Lembaga yang pertama kali mengeluarkan laporan yang detail tentang apa yang terjadi di Qatar. Para pekerja migran ternyata tidak mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Dari laporan lapangan yang ditemukan oleh Amnesty International, para pekerja migran tidak mendapatkan gaji selama berbulan-bulan, mereka dilarang atau tidak bisa keluar dari pekerjaan mereka, kartu identitas dan paspor ditahan oleh majikan mereka, serta diperparah oleh tempat tinggal yang sangat tidak layak huni dan mengancam Kesehatan mereka. Perlakuan terhadap pekerja migran tersebut akhirnya berdampak terhadap tinggi nya angka kematian

yang melibatkan pekerja migran yang bekerja di proyek Piala Dunia tahun 2022. Setelah laporan tersebut dikeluarkan, Sistem Kafala dinilai menjadi akar dari masalah tersebut. Dalam Sistem Kafala, semua peraturan yang dibuat oleh majikan harus diikuti atau pun dipatuhi oleh para pekerja migran, termasuk di bidang pekerjaan. Dalam banyak kasus, para majikan atau sponsor tidak melakukan pembayaran atau dalam kata lain tidak menggaji para pekerja migran. Gaji mereka sering tertunda hingga 4-5 bulan, sedangkan para pekerja migran mempunyai keluarga di negara asal mereka. Para pekerja migran biasanya mengirimkan gaji mereka kepada keluarga mereka yang ada di negara asal. Namun dengan adanya sistem Kafala, para pekerja migran sama sekali tidak diuntungkan. Hidup mereka sepenuhnya bergantung kepada para majikan mereka. Namun akibat sistem Kafala yang terlalu memihak para majikan atau sponsor, para majikan memanfaatkan adanya celah dari sistem tersebut dengan melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya melanggar hukum (Global Construction Review, 2017).

Adanya sistem Kafala ini jelas melanggar hak asasi manusia dan keamanan dari individu para pekerja migran. Segala dokumen-dokumen penting mereka diambil oleh para majikan sehingga para pekerja tidak bisa melakukan apapun termasuk Kembali ke negara asal nya karena paspor mereka dipegang oleh para majikan. Hal tersebut yang membuat badan-badan LSM internasional untuk mengganti sistem Kafala karena dinilai sudah tidak memiliki relevansi terhadap apa yang terjadi di Qatar. Pemerintah Qatar didesak untuk mengkaji ulang atau mengganti Sistem Kafala agar tidak semakin bertambah jumlah pekerja migran yang meninggal dunia serta mengalami gangguan Kesehatan. Banyak pelanggaran hukum yang terjadi akibat sistem Kafala, salah satunya adalah para pekerja migran tidak dapat berhenti dari pekerjaan nya kecuali atas izin dari majikan mereka, padahal perlakuan yang mereka dapatkan sama sekali tidak menguntungkan mereka.

Negara-negara yang memiliki pekerja migran dengan jumlah yang banyak di Qatar seperti Nepal dan Bangladesh juga mendesak agar pemerintah Qatar melakukan perubahan terhadap sistem Kafala. Para pekerja bisa bekerja hingga 10 jam dalam satu hari namun sama sekali tidak mendapatkan gaji akibat dari adanya sistem Kafala tersebut. Sistem Kafala memang merupakan sistem yang sudah

dipakai sejak lama, namun ketika sistem yang ada dianggap tidak relevan dengan situasi yang terjadi sekarang, maka sistem tersebut harus segera diganti, begitu juga yang terjadi dengan Qatar dan Sistem Kafala nya. Hak dari para pekerja migran harus nya menjadi prioritas utama, karena Qatar dinilai sudah gagal dalam menjamin keselamatan para pekerja migran. Sistem Kafala masih memiliki celah yang sangat besar sehingga bisa disalah-gunakan dan kesiapan Qatar dalam mempersiapkan event akbar Piala Dunia tahun 2022 menjadi sorotan dan juga bisa mempengaruhi citra Qatar di dunia internasional, negara-negara yang bekerja sama dengan Qatar dalam bidang lain juga ikut menyoroti tentang apa yang terjadi terhadap pekerja migran tersebut.



BAB III

SISTEM KAFALA PEMERINTAH QATAR TERHADAP PEKERJA MIGRAN PIALA DUNIA 2022 DARI PERSPEKTIF HUMAN SECURITY

Pada Bab III ini peneliti akan membahas tentang penerapan Human Security dan berfokus terhadap Personal Security yang dikaitkan dengan kasus pekerja migran pada persiapan Piala Dunia 2022. Pada Bab ini peneliti akan membagi menjadi dua sub bab, yaitu penerapan konsep Personal Security dan Economic Security yang berpengaruh ke dampak Sistem Kafala terhadap kasus pekerjamigran pada Piala Dunia 2022 di Qatar dan penerapan konsep Human Security yang juga berpengaruh ke dampak Sistem Kafala terhadap kasus pekerja migran Piala Dunia 2022 di Qatar. Pada Bab III ini peneliti akan mencoba mengaitkan konsep Human Security: Personal Security dan Economic Security konsep tersebut kemudian dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

3.1 Penerapan Human Security terhadap pekerja migran di proyek pembangunan Piala Dunia 2022 di Qatar

Freedom from fear dan Freedom from want adalah salah satu konsep dari Human Security. Definisi lain dari konsep tersebut adalah setiap orang memiliki hak untuk memilih apa yang akan dilakukan dalam hidup nya. Setiap individu bebas memilih apa yang hendak dilakukan selama tidak melanggar hukum di suatu negara. Dalam konsep Human Security, salah satu pendekatan dalam perlindungan setiap individu atau kelompok yaitu dengan pendekatan “top-down”. Dalam pendekatan top-down negara selaku pemerintah dan pemegang kekuasaan berperan sebagai orang yang berada di atas (top). Dalam hal ini negara atau pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keamanan individu/kelompok terjamin. Masyarakat biasa atau warga sipil disini berperan sebagai orang yang dibawah sistem (down). Dalam kasus pekerja migran di Qatar, penulis menilai pendekatan *top-down* belum efektif dalam implementasi nya. Pada kenyataan yang terjadi di lapangan, pemerintah Qatar melalui perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan para pekerja migran tersebut tidak memperhatikan nasib atau kondisi para pekerja migran selama bekerja di Qatar. Sehingga hubungan

pemegang kekuasaan atau pemegang peraturan dalam hal ini pemerintah Qatar sebagai (*top*) tidak menjalankan tugasnya yang harusnya dilakukan oleh pemerintah Qatar, sehingga pekerja migran yang ada dibawah dari pemegang kekuasaan(*down*) tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya mereka dapatkan. Oleh karena itu kasus yang berhubungan dengan hak asasi manusia dari pekerja migran itu sendiri masih terjadi. Pada kaitanya dengan kasus pekerja migran di Qatar, penulis menilai bahwa konsep *freedom for fear* dan *freedom from want* serta konseppendekatan *top-down* gagal dimplementasikan oleh Qatar sebagai negara yang bertanggung jawab terhadap para pekerja migran yang menetap di negara mereka. Qatar yang seharusnya melindungi keamanan setiap para pekerja migran pada kenyataan nya tidak melakukan hal tersebut. Dampak dari sistem Kafala membuat para pekerja migran tidak dapat menghindari ancaman salah satu nya *Personal Security* dan *Economic Security*.

Dalam menganalisis kasus pekerja migran di Qatar, penulis telah melakukan analisis tentang *Human Security Approach* atau pendekatan dari *Human Security* dalam melakukan identifikasi masalah. Penulis menganalisis bahwa *Multi-Sectoral* adalah pendekatan yang cukup relevan dalam kasus pekerja migran. Melalui pendekatan *Multi-sectoral*, pihak-pihak yang terlibat dan dinilai bisa membawa perubahan dapat berkontribusi untuk menangani kasus seperti kasus pekerja migran di Qatar. *Multi-sectoral* adalah sebuah pendekatan yang melibatkan pihak-pihak yang berada dalam bidang nya masing-masing, jika dilihat dari kasus pekerja migran di Qatar, pihak-pihak yang berada di bidang kemanusiaan seperti *Amnesty International* bisa dilibatkan dalam menangani kasus pekerja migran tersebut. Berikutnya pihak-pihak selaku penanggung jawab event Piala Dunia 2022 seperti FIFA selaku badan tertinggi sepak bola juga harusnya bisa berkontribusi dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan pekerja migran tersebut. Selanjutnya adalah pemerintah Qatar selaku negara yang menjadi tuan rumah sekaligus bertanggung jawab dalam proyek Piala Dunia 2022 ini. Pemerintah Qatar bisa melakukan perubahan sistem atau melakukan evaluasi terhadap Sistem Kafala agar kasus yang dialami oleh pekerja migran tersebut dapat dihindari untuk kedepannya. Lewat pendekatan *Multi-Sectoral* tersebut penulis menganalisis bahwa pemerintah Qatar harus menjalin komunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan

para pekerja migran tersebut untuk memperketat peraturan yang harusnya berpihak terhadap pekerja migran tersebut. Selanjutnya penulis menganalisis pendekatan *People-Centered* juga bisa dipakai dalam menangani kasus pekerja migran di Qatar. Lewat pendekatan *People Centered*, komunitas atau orang-orang yang terdampak dari kasus pekerja migran ini bisa angkat bicara dan melakukan sesuatu untuk menuntut adanya perubahan. Jumlah pekerja migran yang bekerja dalam proyek Piala Dunia 2022 tergolong cukup besar, jika para komunitas tersebut melakukan sebuah Gerakan untuk mengusulkan adanya perubahan dari sebuah sistem yaitu sistem kafala itu sendiri. Hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap munculnya sebuah perubahan yang bisa menyalakan masalah tersebut. Pendekatan *Multi-Sectoral* dan *People-Centered* adalah dua pendekatan yang bisa dilakukan dalam mengidentifikasi masalah kasus pekerja migran. Lewat dua pendekatan tersebut juga bisa menyelesaikan masalah pekerja migran yang terjadi di Qatar. Ancaman-ancaman seperti jaminan Kesehatan serta kesejahteraan tidak didapatkan oleh para pekerja migran tersebut. Konsep Human Security yang awalnya muncul karena dalam tatanan dunia internasional ancaman tidak hanya datang dari luar dan bidang militer saja, namun dapat berasal dari dalam. Hal ini terbukti dengan apa yang terjadi di Qatar, para pekerja migran tersebut mendapatkan ancaman di tempat mereka bekerja. Dalam kata lain ancaman tersebut berasal dari dalam lingkup pekerjaan mereka. Implementasi dari Sistem Kafala yang digunakan oleh Qatar untuk mempekerjakan para pekerja migran tersebut malah mengancam keamanan individu dari pekerja migran tersebut. Qatar memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa para pekerja migran tersebut mendapatkan keamanan serta mereka bisa merasa aman menetap dan bekerja di Qatar.

3.2 Analisis Sistem Kafala berdampak terhadap Personal Security pekerja migran Piala Dunia 2022 di Qatar.

Personal Security sendiri menurut UNDP adalah keamanan yang bertujuan untuk melindungi setiap orang dari sebuah ancaman, kekerasan fisik dari negara asal, negara lain maupun sesama individu ataupun berkelompok. Dalam konteks individu, keamanan merupakan status seseorang yang merasa ada dalam keadaan aman, terlindung secara fisik dan sosial serta pekerjaan. Keamanan individu juga

dapat diartikan dimana keadaan fisik seseorang terbebas atau aman dari suatu ancaman maupun kejahatan. Keamanan individu adalah kebutuhan untuk bisa melindungi atau berlindung diri dari adanya bahaya yang mengancam di lingkungan sekitarnya. Pada dasarnya kebebasan serta kesejahteraan hidup setiap manusia ataupun individu harus menjadi prioritas dan mendapatkan perhatian yang lebih. Ketika keamanan individu sudah menjadi sebuah prioritas, maka hal-hal lain seperti hak asasi manusia dapat berperan secara signifikan dalam interaksi tiap-tiap individu pada tingkat nasional maupun internasional. Sehingga ketika tidak ada kekerasan terhadap manusia yang terjadi, setiap individu akan mendapatkan dan merasakan adanya hak asasi manusia sehingga dapat dikategorikan setiap individu berada dalam situasi yang aman (United Nations Trust Fund for Human Security, n.d.).

Menurut UNDP, setiap negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi warga negara atau masyarakat nya. Hak asasi manusia berguna untuk memberikan kebebasan untuk masyarakat di wilayah negara nya. Human Security menurut UNDP juga mempunyai definisi sebagai konsep yang dibutuhkan untuk menanggapi kompleksitas antara ancaman lama dan ancaman baru seperti kemiskinan kronis yang terus menerus kekerasan etnis, perdagangan manusia, perubahan iklim serta terorisme internasional dan kemerosotan finansial. Pemerintah dari negara tersebut memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap warga negara yang bekerja di luar negeri.

Sistem Kafala menjadi sebuah sistem yang akhirnya dibuktikan dengan konsep Human Security yang dikaitkan dengan studi kasus tersebut. Hal ini bisa dikaitkan dengan gagalnya Pemerintah Qatar dan Sistem Kafala dalam memenuhi persyaratan dalam menerapkan Human Security. Dalam kaitannya dengan kasus pekerja migran, Personal Security memiliki konsep yaitu sebuah keamanan yang bertujuan untuk melindungi seseorang dari sebuah ancaman, kekerasan fisik dari pihak negara, maupun dari negara lain dan sesama individu ataupun kelompok. Hal ini berkaitan tentang apa yang terjadi di Qatar, yaitu para pekerja migran mendapatkan sebuah ancaman dari negara lain, salah satu bentuknya adalah para pekerja migran dilarang untuk pulang ke negara asalnya karena paspor atau identitas mereka ditahan oleh perusahaan. Keamanan Individu para pekerja migran

otomatis terancam, hal ini yang tentunya berkaitan dengan konsep Personal Security. Penulis sudah menjelaskan dalam Bab II tentang penerapan Sistem Kafala pada proyek Piala Dunia 2022, dalam penerapan yang telah dipaparkan dalam Bab II, penulis dapat menyimpulkan bahwa konsep Human Security berkaitan dengan yang terjadi di Qatar, karena seharusnya para pekerja migran tersebut mendapatkan keamanan individu nya dari negara Qatar. Karena ketika dilihat dari sisi lain, Qatar membutuhkan para pekerja migran tersebut untuk mencapai kepentingannya. Keadaan tersebut diperparah dengan adanya kasus bunuh diri yang dialami oleh Pekerja Migran pada proyek Piala Dunia 2022. Namun aspek Personal Security tidak dijalankan sama sekali oleh pemerintah Qatar.

Salah satu komponen yang Personal Security yang dipakai penulis untuk menganalisis masalah pekerja migran di Qatar adalah komponen *Threats to self*, komponen tersebut mencakup permasalahan yang terjadi terhadap pekerja migran tersebut, karena pada kenyataan yang terjadi di lapangan adalah adanya kasus bunuh diri yang dilakukan oleh pekerja migran. Ancaman yang dapat dikategorikan sebagai *Threats to self* yang terjadi dalam kasus pekerja migran Piala Dunia Qatar tahun 2022 adalah terjadinya kasus bunuh diri. Bentuk dari ancaman *threats to self* dapat terjadi dikarenakan adanya suatu keadaan atau kondisi yang menyebabkan terjadinya tekanan yang dialami suatu individu. Suatu individu merasa terancam sehingga ia memutuskan untuk melakukan hal-hal yang membahayakan diri nya sendiri. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan adanya tekanan yang dirasakan oleh para pekerja migran Piala Dunia Qatar tahun 2022, lingkungan yang sangat tidak mendukung akibat adanya eksploitasi tenaga kerja yang mereka alami membuat kondisi psikis parah pekerja migran tersebut terkena dampak nya. Oleh karena itu adanya kasus bunuh diri membuktikan bahwa kondisi atau keadaan yang dialami oleh para pekerja migran tersebut merupakan salah satu bentuk dari *threats to self*. Adanya kasus bunuh diri tersebut merupakan salah satu komponen dari Personal Security yaitu *threats to self* yang mencakup bunuh diri. Dalam artian, para pekerja migran tersebut psikis nya terdampak sehingga mereka merasa ada ancaman dalam diri mereka sehingga adanya kasus bunuh diri yang termasuk dalam komponen *threats to self*.

Memberi perlindungan terhadap para pekerja migran merupakan salah satu peran penting suatu negara, namun seperti apa yang terjadi pada pekerja migran di Qatar, terbukti *Personal Security* tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penyebab tidak dijalankannya *Personal Security* adalah datang dari Sistem Kafala tersebut, kemudian dijalankan oleh perusahaan-perusahaan sponsor Piala Dunia Qatar 2022. Dapat dianalisis juga bahwa salah satu penyebab para perusahaan sponsor tidak menjalankan konsep *Personal Security* selain masih banyak celah dari Sistem Kafala itu sendiri adalah ingin menekan biaya pengeluaran sehingga berdampak terhadap fasilitas yang diterima oleh para pekerja migran dan upah mereka yang tidak dibayar. Dibutuhkan payung hukum yang jelas dan sistem yang jelas agar pelanggaran *Personal Security* tidak terjadi lagi pada kasus pekerja migran di proyek pembangunan Piala Dunia 2022. Para pekerja migran menjadi objek utama dalam konsep *Personal Security*, karena mereka terdampak langsung yaitu keamanan individu para pekerja migran terganggu dan tidak digunakan secara semestinya. Salah satu contoh pelanggaran *Personal Security* adalah para pekerja migran tersebut bekerja selama 148 hari non-stop tanpa libur. Hal ini tentunya sudah termasuk dalam kategori kerja paksa yang tentunya mengancam keselamatan serta keamanan individu dari pekerja migran itu sendiri. Berikutnya adalah identitas dari setiap pekerja migran yang ditahan oleh para perusahaan/majikan yang mempekerjakan mereka. Hal berikutnya yang mengancam *Personal Security* dari para pekerja migran tersebut adalah tempat tinggal yang melebihi kapasitas yang seharusnya. Hal-hal tersebut termasuk dalam pelanggaran *Personal Security*. Dapat dikatakan bahwa implementasi Sistem Kafala oleh pemerintah Qatar gagal dalam mengimplementasikan konsep *Personal Security*. Qatar sebagai negara yang bertanggung jawab dalam persiapan serta pelaksanaan kegiatan gagal untuk mengedepankan keamanan individu dari para pekerja migran sehingga konsep *Personal Security* seharusnya menjadi acuan dari Qatar atau Pemerintah Qatar sendiri. Penulis dapat menyimpulkan bahwa konsep *Personal Security* yang seharusnya dijalankan dan menjadi aspek penting bagi pemerintah Qatar dalam mempekerjakan para pekerja migran tersebut sama sekali tidak berjalan, padahal dalam konsep *Personal Security* sendiri sudah mencakup tentang bagaimana

keamanan seorang individu yang seharusnya menjadi skala prioritas yang harus dijalankan.

3.3 Analisis Sistem Kafala berdampak terhadap Economic Security pekerja migran Piala Dunia 2022 di Qatar

Economic Security memiliki definisi yaitu suatu konsep yang menegaskan bahwa akses untuk mendapatkan sumber daya, keuangan dan pasar menjadi sebuah elemen yang penting dalam keberlangsungan hidup ataupun keketahanan dalam suatu negara. Upaya untuk memenuhi sebuah kebutuhan yang berhubungan dengan bidang ekonomi adalah sesuatu yang cukup signifikan bagi individu maupun kelompok. Tindakan tersebut bisa terwujud melalui pengaruh globalisasi ataupun teknologi yang menghasilkan pola-pola hubungan ekonomi yang beragam (UNDP). Qatar memiliki jumlah pekerja migran yang cukup banyak, ada sekitar 1,5 juta pekerja migran yang menetap di Qatar. Hal tersebut berkaitan dengan bukti bahwa Qatar membutuhkan pekerja migran dalam skala yang besar untuk menunjang perekonomian negara mereka. Faktor ekonomi Qatar yang semakin meningkat juga berperan besar dalam tingginya angka pekerja migran di Qatar. Terlebih Qatar sedang mengerjakan proyek yang besar yaitu menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2022. Tentunya sumber daya yang dibutuhkan Qatar cukup banyak untuk menunjang segala fasilitas pendukung. Faktor tersebut juga yang mendorong para pekerja migran datang dan memilih untuk bekerja sebagai pekerja migran di Qatar untuk mengharapkan mendapat upah yang lebih baik dan untuk kesejahteraan keluarganya. Menurut ILO (International Labour Organization) perkembangan ekonomi mempengaruhi kompetisi pekerjaan yang berkualitas. Hal tersebut menyebabkan banyaknya para tenaga kerja yang menetap di negara-negara berkembang yang tidak mampu bersaing di pasar yang lebih kompetitif.

Pada penelitian ini, penulis secara khusus membahas Economic Security yang berkaitan dengan kasus pekerja migran di Qatar. Qatar sebagai negara yang merekrut para pekerja migran sekaligus negara tempat para pekerja migran menetap harusnya memberikan perlindungan kepada para pekerja migran tersebut. Qatar memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan dan kelangsungan hidup

para pekerja migran tersebut. Terlebih biaya yang dikeluarkan Qatar untuk membangun segala infrastruktur tergolong sangat besar. Qatar mengeluarkan dana sebesar \$200 Miliar Dollar Amerika untuk menunjang segala aspek pembangunan hingga rampung nya Piala Dunia 2022. Peran pemerintah Qatar sangat penting untuk membuat suatu kebijakan yang memberikan akses untuk para pekerja migran mendapatkan akses ekonomi yang seharusnya mereka dapatkan. Namun pada kenyataan yang terjadi di lapangan, Qatar belum bisa memenuhi penerapan konsep Economic Security, hal ini berkaitan dengan upah para pekerja migran tersebut seringkali terlambat dibayarkan bahkan tidak dibayar sama sekali.

Apa yang terjadi terhadap pekerja migran di Qatar tersebut berkaitan dengan ancaman utama dari Economic Security, yaitu *Persistent Poverty* dan *Unemployment*. Para pekerja migran di Qatar tidak mendapatkan upah yang seharusnya mereka dapatkan, hal ini tentunya dapat menyebabkan kemiskinan dan berkaitan dengan salah satu konsep dari *Economic Security* yaitu *Persistent Poverty*. Para pekerja migran tersebut memilih pekerjaan di luar negeri yaitu di Qatar dengan harapan mendapatkan upah yang lebih baik untuk kemudian dikirimkan kepada keluarga mereka yang berada di negara asal mereka. Namun pada kenyataan nya konsep *Human Security* dan khusus nya *Economic Security* tidak dijalankan oleh Qatar sebagai penanggung jawab, Sistem Kafala yang menjadi akar dari permasalahan karena dalam peraturan di Sistem Kafala tersebut, para pekerja migran sepenuhnya bergantung kepada perusahaan atau majikan yang mempekerjakan mereka. Berikutnya salah satu bentuk ancaman dari konsep *Economic Security* adalah *Unemployment* atau pun dalam bahasa Indonesia berarti pengangguran. Sistem Kafala yang dipakai pemerintah Qatar memudahkan para majikan/*sponsor* untuk memutuskan kontrak para pekerja migran tersebut kapan saja, dalam artian mereka bisa diberhentikan dari pekerjaan mereka kapan saja oleh para majikan/*sponsor* yang mempekerjakan mereka. Hal ini tentunya dapat menimbulkan serta menyebabkan terjadi nya *Unemployment* atau pun pengangguran. *Unemployment* merupakan salah satu bentuk ancaman dari Economic Security, oleh karena itu kejadian yang menimpa para pekerja migran tersebut merupakan salah satu bentuk ancaman yang dapat menyebabkan terjadinya *Unemployment*.

Salah satu komponen atau unsur dari Economic Security yang dipakai oleh penulis adalah *Assured access to basic income* yang memiliki definisi yaitu akses terhadap pendapatan. Hal ini yang terjadi dalam kasus pekerja migran di Qatar, akses untuk mendapatkan pendapatan mereka terhambat akibat gaji atau upah para pekerja migran tersebut tidak dibayarkan. Dengan adanya temuan tidak dibayarkannya gaji para pekerja migran tersebut kemudian terkait dengan unsur yang dimiliki oleh Economic Security yaitu *Assured access to basic income*. Dengan kondisi yang dialami oleh para pekerja migran tersebut yang pada kenyataannya tidak mendapatkan upah yang semestinya mereka dapatkan, sehingga hak yang harusnya mereka dapatkan tidak terpenuhi. Komponen *assured access to basic income* memberikan definisi bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses untuk mendapatkan pendapatan atau pun haknya. Dengan tidak dibayarkan gaji para pekerja migran tersebut dapat dikatakan bahwa aspek *assured access to basic income* para pekerja migran Piala Dunia Qatar 2022 tidak dapat terpenuhi. Dengan adanya sistem Kafala tersebut maka para majikan/*sponsor* sangat leluasa untuk memutuskan terhadap yang mereka lakukan ke para pekerja migran Piala Dunia Qatar tahun 2022.

Dapat dianalisis bahwa pelanggaran Economic Security berasal dari Sistem Kafala yang diterapkan oleh Qatar dan dijalankan oleh para perusahaan sponsor proyek Piala Dunia 2022. Peneliti menganalisis bahwa adanya Sistem Kafala berdampak sangat besar terhadap kondisi para pekerja migran di Qatar, karena dari itu salah satu aspek yaitu *Economic Security* dari para pekerja migran tersebut tidak dapat terpenuhi. Dari datang yang telah dihimpun penulis dari Amnesty International bahwa akibat penundaan upah yang akan dibayarkan kepada para pekerja migran, mereka terlilit hutang yang kemudian membuat para pekerjamigran mau tidak mau harus tetap menetap di Qatar, hal tersebut tentunya sejalan dengan salah satu aspek dari *Economic Security* yaitu *Persistent Poverty* yaitu kemiskinan yang terus menerus. Karena para pekerja migran tersebut memutuskan untuk bermigrasi ke negara lain dan dalam kasus ini memutuskan untuk bermigrasi ke Qatar merupakan bukti bahwa para pekerja migran tersebut menginginkan kesejahteraan yang mereka dapatkan sehingga bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dibanding kesejahteraan yang mereka dapatkan di negara asal

mereka. Dengan tidak dibayarkan upah para pekerja migran tersebut atau bahkan bisa tertunda sampai 7 bulan dapat menyebabkan kemiskinan yang terus menerus. Hal yang terjadi ini merupakan salah satu bentuk dari ancaman Economic Security oleh adanya Sistem Kafala yang menyebabkan terjadinya *Persistent Poverty* atau kemiskinan secara terus menerus. Dengan adanya bentuk ancaman *Persistent Poverty* atau kemiskinan secara terus menerus membuktikan bahwa Sistem Kafala menyebabkan terjadinya kasus seperti tidak dibayarkan upah atau gaji dari para pekerja migran Piala Dunia Qatar 2022 itu sendiri.

Berikutnya adalah bentuk ancaman yang termasuk dalam Economic Security adalah *Unemployment* atau dalam bahasa Indonesia berarti pengangguran. Dengan adanya Sistem Kafala yang memberikan kelulasaan terhadap para majikan/sponsor untuk memberhentikan kapan saja para pekerja migran tersebut yang akhirnya menimbulkan terjadi nya pengangguran yang menimpa para pekerja migran tersebut. Dengan adanya kejadian pemberhentian oleh para majikan/sponsor tersebut membuktikan bahwa Sistem Kafala memberi ruang yang terlalu luas terhadap para majikan/sponsor yang kemudian berdampak dengan terjadinya eksploitasi tenaga kerja. Para pekerja migran yang seharusnya menerima upah dan bekerja sesuai kontrak yang dari awal sudah disepakati kemudian menjadi celah untuk para majikan/sponsor untuk mengeksploitasi para pekerja migran tersebut sehingga tidak terjadinya penunggakan gaji serta pemberhentian para pekerja migran secara sepihak. Dua bentuk ancaman Economic Security yaitu *Persistent Poverty* dan *Unemployment* disebabkan oleh Sistem Kafala yang sangat mudah untuk di eksploitasi. Dengan terpenuhi nya dua ancaman dari Economic Security yaitu *Persistent Poverty* dan *Unemployment* dapat disimpulkan bahwa konsep Economic Security merupakan konsep yang relevan untuk dipakai sebagai konsep untuk menjawab analisis dari penelitian ini yang berfokus kepada Sistem Kafala yang kemudian menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap Pekerja Migran Piala Dunia Qatar tahun 2022. Dengan adanya dua ancaman yang termasuk dalam Economic Security tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ancaman-ancaman yang termasuk dalam konsep Economic Security dialami oleh para pekerja migran Piala Dunia Qatar tahun 2022.

Penulis menilai bahwa implementasi dari konsep *Economic Security* belum dilakukan oleh pemerintah Qatar karena masih adanya celah dalam Sistem Kafala yang memungkinkan para perusahaan-perusahaan sponsor untuk memanfaatkan celah tersebut sehingga kemandirian ekonomi atau *Economic Security* dari para pekerja migran tersebut tidak terpenuhi.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pembahasan dalam penelitian ini telah membahas secara spesifik dampak Sistem Kafala terhadap kasus pekerja migran Piala Dunia 2022 di Qatar. Topik penelitian di atas adalah sebuah landasan ilmiah untuk menganalisis dampak dari Sistem Kafala terhadap para pekerja migran yang mengalami kasus kerja paksa di proyek pembangunan Piala Dunia tahun 2022 di Qatar.

Penulis menggunakan *Human Security* sebagai landasan konsep untuk menganalisis serta menjawab rumusan masalah penelitian ini. Konsep *Personal Security* dan *Economic Security* digunakan untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. Qatar yang merupakan negara penyelenggara Piala Dunia 2022 gagal dalam memenuhi aspek-aspek *Human Security* dari para pekerja migran tersebut. Kondisi yang dialami para pekerja migran dapat dikategorikan sebagai kerja paksa. Kondisi yang dialami para pekerja migran seperti akses tempat tinggal yang tidak layak, penahanan identitas, larangan untuk kembali ke negara asal merupakan salah satu pelanggaran aspek dari *Personal Security*. Perusahaan-perusahaan yang berada dalam naungan Pemerintah Qatar memberikan perlakuan yang tidak layak terhadap para pekerja migran tersebut. Sistem Kafala yang masih dipakai Qatar menjadi akar masalah sehingga kasus seperti ini bisa terjadi. Keamanan Individu yang merupakan salah satu aspek terpenting dari *Human Security* tidak dapat dipenuhi oleh Qatar sebagai tuan rumah sekaligus penanggung jawab. Selain aspek *Personal Security*.

Aspek berikutnya yang kemudian juga menjadi landasan konsep pada penelitian ini adalah *Economic Security*. Kemiskinan yang dialami oleh para pekerja migran yang diakibatkan oleh upah yang tidak dibayar oleh majikan yang mempekerjakan para pekerja migran tersebut. Hal ini tentunya berkaitan dengan definisi dari *Economy Security* itu sendiri. Definisi dari *Economy Security* adalah menjamin setiap individu untuk mendapatkan sumber daya secara tepat. Kasus pekerja migran yang terjadi di Qatar tersebut merupakan akibat dari Sistem Kafala

yang masih banyak memerlukan evaluasi, karena jika Sistem Kafala masih terus dipakai, maka kasus yang menimpa pekerja migran tersebut masih akan terus bertambah. Ditambah lagi kasus yang menimpa para pekerja migran tersebut memiliki jumlah korban yang cukup banyak. Konsep *Human Security* merupakan konsep yang kemudian menjawab penelitian ini tentang apa yang terjadi terhadap para pekerja migran di Qatar. Pada akhirnya, skripsi yang berjudul “Kebijakan Sistem Kafala Pemerintah Qatar terhadap pekerja migran Piala Dunia 2022” dapat memberikan pemahaman mendasar tentang kegagalan Qatar dalam mengimplementasikan Sistem Kafala sehingga para pekerja migran tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya mereka dapatkan.

4.2 Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dibuat oleh Peneliti, dapat disimpulkan bahwa peneliti masih menyadari kekurangan data dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini. Data-data yang terhimpun juga masih memiliki banyak kekurangan dikarenakan akses terhadap sumber data cukup terbatas.

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, penulis memberikan saran dan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut. Salah satunya adalah tentang bagaimana Sistem Kafala bisa menjadi sebuah sistem yang dipakai hingga bertahun-tahun dan masih dipakai hingga sekarang. Kedua yaitu tentang mengganti atau adanya sebuah evaluasi lebih lanjut dari Sistem Kafala dengan Sistem lain. Karena Sistem Kafala menurut penulis sudah tidak relevan lagi, selanjutnya penulis mengusulkan adanya sebuah penelitian tentang sistem seperti apa yang dibutuhkan oleh Qatar sehingga kasus yang melibatkan pekerja migran ini tidak terjadi lagi karena kasus seperti ini sudah termasuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia, mengingat jumlah pekerja migran yang bekerja pada proyek pembangunan Piala Dunia tahun 2022 ini sangat besar, dengan kata lain penulis berharap tidak ada korban jiwa atau pihak-pihak yang dirugikan dalam pembangunan pesta sepak bola terbesar yang sebenarnya mempunyai tujuan sebagai hiburan untuk masyarakat di seluruh penjuru dunia dan khususnya penggemar sepak bola di seluruh dunia.



DAFTAR PUSTAKA

- Haris, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Pattisson, P. (2013, 09 25). Revealed: Qatar's World Cup 'slaves'. Revealed: Qatar's World Cup 'slaves'.
- Ganji, S. K. (2016). Leveraging the World Cup: Mega Sporting Events, Human Rights Risk, and Worker Welfare Reform in Qatar. *Journal on Migration and Human Security*.
- Donini, A. (2019). Social Suffering and Structural Violence: Nepali Workers in Qatar. In A. Donini, & C. Gironde (Ed.), *Tacking Today's Dilemma and Tomrrow's Challenges* (Vol. 9, pp. 178-179). Doha, Qatar: Jstor.
- Khan, S. (2019, 11 28). FIFA'S Calling: Giving Qatar the Red Card. *FIFA'S Calling: Giving Qatar the Red Card*, 36, 50-52.
- Renkiewicz, P. (2018). Sweag Makes The Green Grass Grow: The Precarious Future of Qatar's Migrant Workers In The Run Up To The 2022 FIFA World Cup Under The Kafala System And Recomendations For Effective Reform
- Clark, J. (1996). James S. Coleman. London: USA The Falmer Press.
- Ritzer. (2008). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Rosidin. (2015). *Analisis Teori Pilihan Rasional Terhadap Transformasi Madrasah*. Malang: UIN Maliki Malang.
- Sugiarto. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Thesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Ganji, S. K. (2016). Revealed: Leveraging the World Cup: Mega Sporting Events, Human Rigts Risk, and Worker Welfare Reform in Qatar . *Journal on Migration and Human Security*.

Amnesty International. (2016). Qatar World Cup Of Shame. Retrieved from
Amnesty International:
<https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/03/qatar-world-cup-of-shame/>

Ridgwell, H. (2019). Amnesty: Qatar Migrant Workers Face Unpaid Wages, Dire Conditions. Retrieved from VOA: <https://www.voanews.com/middle-east/amnesty-qatar-migrant-workers-face-unpaid-wages-dire-conditions>

Patisson. (2013). Revealed: Qatar's World Cup "slaves".

Council, U.-Q. B. (2017). Amnesty International Report on Qatar's Migrant Workers. Retrieved from US-Qatar Business Council.

BBC. (2016). Qatar 2022: 'Forced labour' at World Cup stadium. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-35931031>

Clark, J. (1996). James S. Coleman. London: UK The Falmer Press.

Internantional Labour Organization. (2018). Policy Brief No. 2: REFORM OF THE KAFALA (SPONSORSHIP) SYSTEM. Internantional Labour Organization.

Bel-Air, F. D. (2014). Demography, Migration, and Labour Market in Qatar. Gulf Research Center, 3-13.

Amnesty International. (2019). ALL WORK, NO PAY THE STRUGGLE OF QATAR'S MIGRANT WORKERS FOR JUSTICE. Amnesty International.

Jureidini, R. (2014). Migrant Labour Recruitment to Qatar. Bloomsbury Qatar Foundation Journals.

Burchil, S. (2005). Theory of International Relations. Houndmills: MACMILLAN.

- Lyke, B. (2016). Does Trade Openess Matter for Economics Growth in CEE Countries? Muenchen: Deakin University.
- Ismanto, I. (2010). Perubahan Ekonomi Global dan Tantangan bagi Indonesia. Tantangan ekonomi untuk Indonesia.
- Capling, A. (2008). Twenty Years Australia Engagement with Asia. Australia: The Pacific Review.
- Church, P. (2009). History of Southeast Asia. Singapore: John Willey & Sons (Asia) Pte Ltd.
- Wang, V. W.-C. (2006). China Economic Statecraft Toward Southeast Asia Free Trade Agreement and "Peacefull Rise". American Journal of Chinese Studies, 5-34.
- Kementrian Perdagangan Indonesia. (2018, May 30). ASEAN-China Free Trade Agreement. Retrieved from Kementrian Perdagangan Indonesia: <http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/asean-1-fta/asean-china>
- Laporan Triwulan BAPPENAS. (2013). Perkembangan Ekonomi Indonesia. Indonesia: Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS.
- Sadiaa M., J. R. (2014). The Oxford Handbook of The International Relations of Asia. London: Oxford University Press.
- ASEAN Organization. (2016, October 3). Regional Comperhensive Economic Partnership. Retrieved from ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIA NATION: https://asean.org/?static_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership
- Pattisson, P. (2013, 09 25). Revealed: Qatar's World Cup 'slaves'. Revealed: Qatar's World Cup 'slaves'.
- Ganji, S. K. (2016). Leveraging the World Cup: Mega Sporting Events, Human Rights Risk, and Worker Welfare Reform in Qatar. Journal on Migration and Human Security.

- Donini, A. (2019). Social Suffering and Structural Violence: Nepali Workers in Qatar. In A. Donini, & C. Gironde (Ed.), Tacking Today's Dilemma and Tomrrow's Challenges (Vol. 9, pp. 178-179). Doha, Qatar: Jstor.
- Khan, S. (2019, 11 28). FIFA'S Calling: Giving Qatar the Red Card. FIFA'S Calling: Giving Qatar the Red Card, 36, 50-52.
- Ritzer. (2008). Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Rosidin. (2015). Analisis Teori Pilihan Rasional Terhadap Transformasi Madrasah. Malang: UIN Maliki Malang.
- Sugiarto. (2015). Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Thesis. Yogyakarta: Suaka Media.
- Amnesty International. (2016). Qatar World Cup Of Shame. Retrieved from Amnesty International: <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/03/qatar-world-cup-of-shame/>
- Ridgwell, H. (2019). Amnesty: Qatar Migrant Workers Face Unpaid Wages, Dire Conditions. Retrieved from VOA: <https://www.voanews.com/middle-east/amnesty-qatar-migrant-workers-face-unpaid-wages-dire-conditions>
- Patisson. (2013). Revealed: Qatar's World Cup "slaves".
- Council, U.-Q. B. (2017). Amnesty International Report on Qatar's Migrant Workers. Retrieved from US-Qatar Business Council.
- BBC. (2016). Qatar 2022: 'Forced labour' at World Cup stadium. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-35931031>
- Clark, J. (1996). James S. Coleman. London: UK The Falmer Press.
- Internantional Labour Organization. (2018). Policy Brief No. 2: REFORM OF THE KAFALA (SPONSORSHIP) SYSTEM. Internantional Labour Organization.
- Bel-Air, F. D. (2014). Demography, Migration, and Labour Market in Qatar. Gulf Research Center, 3-13.

- Amnesty International. (2019). ALL WORK, NO PAY THE STRUGGLE OF QATAR'S MIGRANT WORKERS FOR JUSTICE. Amnesty International.
- Jureidini, R. (2014). Migrant Labour Recruitment to Qatar. Bloomsbury Qatar Foundation Journals.
- Nations, U. (n.d.). HUMAN SECURITY IN THEORY AND PRACTICE. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs .
- Krieg, A. (2021, 4). Qatar World Cup 2022: Critics are spinning the facts on migrant labour. Retrieved from Middle East Eye: <https://www.middleeasteye.net/opinion/qatar-world-cup-migrant-labour-critics-spinning-facts>
- BBC. (2017, 2 8). Qatar spending \$500m a week on World Cup infrastructure projects. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-38905510>
- Qatar Day. (2020). FIFA World Cup 2022 Costs & Budget Overview. Retrieved from Qatar Day: <https://www.qatarday.com/blog/information/fifa-world-cup-2022-costs-budget-overview/70204>
- The Guardian. (2021, 3). Revealed: 6,500 migrant workers have died in Qatar since World Cup awarded. Retrieved from The Guardian: <https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/23/revealed-migrant-worker-deaths-qatar-fifa-world-cup-2022>
- Owens, J. (2021, 2 25). Report: More than 6,500 migrant workers have died during Qatar's World Cup prep. Retrieved from Yahoo Sports: <https://sports.yahoo.com/report-more-than-6500-migrant-workers-have-died-during-qatars-world-cup-prep-043412847.html>
- npr. (2021, 2 27). Report Reveals More Than 6,500 Migrant Workers Have Died In Qatar's World Cup Prep. Retrieved from npr: <https://www.npr.org/2021/02/27/972056906/report-reveals-more-than-6-500-migrant-workers-have-died-in-qatars-world-cup-pre>

- The Athletic. (2021, 3 22). FIFA urged to act over labour abuses ahead of Qatar World Cup. Retrieved from The Athletic: <https://theathletic.com/news/qatar-2022-world-cup-workers-deaths/paEuHSrN2wR1>
- Human Rights Watch. (2020, 8 24). Qatar: Little Progress on Protecting Migrant Workers. Retrieved from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2020/08/24/qatar-little-progress-protecting-migrant-workers>
- Eickelberg, H. (2020, 12 2). Foreign and Migrant Workers in the Middle East: The Kafala System Explained. Retrieved from Policy Association: <https://www.hrpolicy.org/news/story/foreign-and-migrant-workers-in-the-middle-east--the-kafala-system-explained-18081#:~:text=Utilized%20among%20Gulf%20Corporation%20Council,tavel%20expenses%20and%20living%20accommodations.&text=Under%20the%20system%2C%2>
- Lyke, B. (2016). *Does Trade Openness Matter for Economics Growth in CEE Countries?* Muenchen: Deakin University.
- Ismanto, I. (2010). *Perubahan Ekonomi Global dan Tantangan bagi Indonesia. Tantangan ekonomi untuk Indonesia.*
- Capling, A. (2008). *Twenty Years Australia Engagement with Asia.* Australia: The Pacific Review.
- Church, P. (2009). *History of Southeast Asia.* Singapore: John Willey & Sons (Asia) Pte Ltd.
- Wang, V. W.-C. (2006). China Economic Statecraft Toward Southeast Asia Free Trade Agreement and "Peacefull Rise". *American Journal of Chinese Studies*, 5-34.
- Kementrian Perdagangan Indonesia. (2018, May 30). *ASEAN-China Free Trade Agreement.* Retrieved from Kementrian Perdagangan Indonesia: <http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/asean-1-fta/asean-china>
- Laporan Triwulan BAPPENAS. (2013). *Perkembangan Ekonomi Indonesia.* Indonesia: Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS.

- Sadiaa M., J. R. (2014). *The Oxford Handbook of The International Relations of Asia*. London: Oxford University Press.
- ASEAN Organization. (2016, October 3). *Regional Comprehensive Economic Partnership*. Retrieved from ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIA NATION: https://asean.org/?static_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership
- Pattisson, P. (2013, 09 25). Revealed: Qatar's World Cup 'slaves'. *Revealed: Qatar's*
- Ridgwell, H. (2019). *Amnesty: Qatar Migrant Workers Face Unpaid Wages, Dire Conditions*. Retrieved from VOA: <https://www.voanews.com/middle-east/amnesty-qatar-migrant-workers-face-unpaid-wages-dire-conditions>
- Patisson. (2013). Revealed: Qatar's World Cup "slaves".
- Council, U.-Q. B. (2017). *Amnesty International Report on Qatar's Migrant Workers*. Retrieved from US-Qatar Business Council.
- BBC. (2016). *Qatar 2022: 'Forced labour' at World Cup stadium*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-35931031>
- International Labour Organization. (2018). Policy Brief No. 2: REFORM OF THE KAFALA (SPONSORSHIP) SYSTEM. *International Labour Organization*.
- Bel-Air, F. D. (2014). Demography, Migration, and Labour Market in Qatar. *Gulf Research Center*, 3-13.
- Nations, U. (n.d.). HUMAN SECURITY IN THEORY AND PRACTICE. *Office for the Coordination of Humanitarian Affairs*.
- Krieg, A. (2021, 4). *Qatar World Cup 2022: Critics are spinning the facts on migrant labour*. Retrieved from Middle East Eye: <https://www.middleeasteye.net/opinion/qatar-world-cup-migrant-labour-critics-spinning-facts>
- BBC. (2017, 2 8). *Qatar spending \$500m a week on World Cup infrastructure projects*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-38905510>
- Qatar Day. (2020). *FIFA World Cup 2022 Costs & Budget Overview*. Retrieved from Qatar Day: <https://www.qatarday.com/blog/information/fifa-world-cup-2022-costs-budget-overview/70204>
- The Guardian. (2021, 3). *Revealed: 6,500 migrant workers have died in Qatar since World Cup awarded*. Retrieved from The Guardian: <https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/23/revealed-migrant-worker-deaths-qatar-fifa-world-cup-2022>

- Owens, J. (2021, 2 25). *Report: More than 6,500 migrant workers have died during Qatar's World Cup prep*. Retrieved from Yahoo Sports:
<https://sports.yahoo.com/report-more-than-6500-migrant-workers-have-died-during-qatars-world-cup-prep-043412847.html>
- npr. (2021, 2 27). *Report Reveals More Than 6,500 Migrant Workers Have Died In Qatar's World Cup Prep*. Retrieved from npr:
<https://www.npr.org/2021/02/27/972056906/report-reveals-more-than-6-500-migrant-workers-have-died-in-qatars-world-cup-pre>
- The Athletic. (2021, 3 22). *FIFA urged to act over labour abuses ahead of Qatar World Cu*. Retrieved from The Athletic:
<https://theathletic.com/news/qatar-2022-world-cup-workers-deaths/paEuHSrN2wR1>
- Human Rights Watch. (2020, 8 24). *Qatar: Little Progress on Protecting Migrant Workers*. Retrieved from Human Rights Watch:
<https://www.hrw.org/news/2020/08/24/qatar-little-progress-protecting-migrant-workers>
- Eickelberg, H. (2020, 12 2). *Foreign and Migrant Workers in the Middle East: The Kafala System Explained*. Retrieved from Policy Association:
<https://www.hrpolicy.org/news/story/foreign-and-migrant-workers-in-the-middle-east--the-kafala-system-explained-18081#:~:text=Utilized%20among%20Gulf%20Corporation%20Council,tavel%20expenses%20and%20living%20accommodations.&text=Under%20the%20system%2C%2>
- United Nations Trust Fund for Human Security. (n.d.). *HUMAN SECURITY IN THEORY AND PRACTICE*. Retrieved from United Nations Trust Fund for Human Security:
<https://www.unocha.org/sites/dms/HSU/Publications%20and%20Products/Human%20Security%20Tools/Human%20Security%20in%20Theory%20and%20Practice%20English.pdf>